

# **SKRIPSI**

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016  
tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam  
Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di  
Kabupaten Sidoarjo



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**  
**TAHUN 2018**  
**SKRIPSI**

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun  
2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar  
Dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di  
Kabupaten Sidoarjo



Disusun sebagai syarat memperoleh predikat Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Oleh :

**MAYDRILLA PUTRI CHINDRAWAN**

142040100011

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**  
**TAHUN 2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87  
Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu  
Bersih Pungutan Liar Dalam Upaya  
Pencegahan Pungutan Liar Di Kabupaten  
Sidoarjo

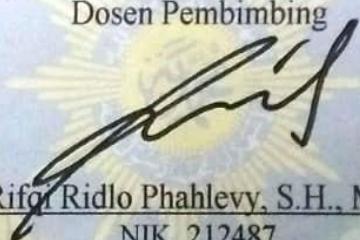
Nama Mahasiswa : Maydrilla Putri Chindrawan

NIM : 142040100011

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian  
skripsi yang diselenggarakan pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Tanggal  
04 Bulan Agustus Tahun 2018

Sidoarjo, 04 Agustus 2018

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



Rifqi Ridlo Phahlevy, S.H., M.H  
NIK. 212487

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H  
NIK. 205256



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Upaya Pencegahan Pungutan Liar Di Kabupaten Sidoarjo

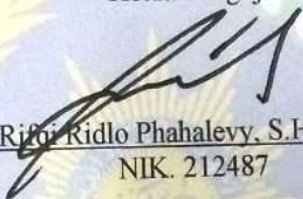
Nama Mahasiswa : Maydrilla Putri Chindrawan

NIM : 142040100011

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tanggal 04 bulan Agustus tahun 2018.


Sidoarjo, 04 Agustus 2018

Dewan Penguji :  
Ketua Penguji



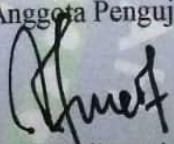
Rifi Ridlo Phahalevy, S.H., M.H  
NIK. 212487

Anggota Penguji



Emy Rosna Wati, S.H., M.H  
NIK. 208338


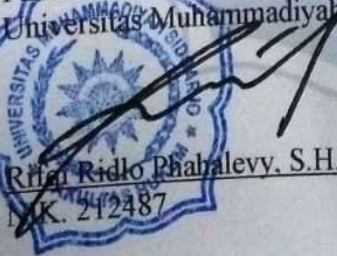
Anggota Penguji



Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H  
NIK. 205256



Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



Rifi Ridlo Phahalevy, S.H., M.H  
NIK. 212487

Ketua Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H  
NIK. 205256

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Maydrilla Putri Chindrawan

NIM : 142040100011

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Sidoarjo, 04 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan



Maydrilla Putri Chindrawan

## KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan atas ridho yang Allah SWT berikan atas terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan tepat waktu dan segala hambatan dalam perjalanan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala usaha, maka penulis menetapkan “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo” sebagai judul skripsi.

Keterbatasan ilmu dan juga kemampuan penulis dalam menyusun skripsi ini, dapat dilengkapi oleh beberapa pihak yang membantu penulisan dari awal hingga akhir. Do’a, dukungan, dan masukan selalu penulis dapatkan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang tidak terukur kami sampaikan kepada :

1. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do’a, dukungan, dan masukan.
2. Abdul Fatah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing.

3. Rifqi Ridlo Phahlevy, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing.

4. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Muhammadiyah Sidoarjo dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

5. Teman sejawat Fakultas Hukum Muhammadiyah Sidoarjo yang selalu memberikan dukungan dan bertukar pikiran.

6. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dari awal penulisan hingga akhir.

Semoga Allah SWT melimpahkan kebaikan yang terlibat kepada semuanya. Dengan kesadaran penuh atas keterbatasan pengetahuan, maka dalam skripsi ini masih memiliki kekurangan. Tetapi penulis berharap skripsi ini dapat sedikit memberikan informasi ilmiah kepada pembaca dan dapat memberikan manfaat.

Sidoarjo, 04 Agustus 2018

Maydrilla Putri Chindrawan



## **ABSTRAK**

Dewasa ini keseriusan pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap pungutan liar dapat dilihat dari pembentukan Satgas Saber Pungli melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli memiliki 4 (empat) fungsi yaitu fungsi intelijen, fungsi pencegahan, fungsi penindakan dan fungsi yustisi. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli dalam penanggulangan pungli di Kab.Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sosio legal. Sosio legal adalah metode dengan kombinasi berbagai keilmuan selain hukum dan ilmu hukum itu sendiri. Hasil yang didapat dari penelitian bahwa di Kab.Sidoarjo telah dilakukan tindak lanjut dengan membentuk Satgas Saber Pungli melalui Keputusan Bupati Nomor 188/235/438.1.1.3/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Selama 1 (satu) tahun berjalan, Satgas Saber Pungli Kab. Sidoarjo telah melakukan fungsinya sebagaimana Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli



**Kata Kunci: Pungutan Liar, Satgas Saber Pungli, Penegakan Hukum**



## **ABSTRACT**

*The government's commitment to eradicate the illegal levies could be seen by the establishment of Clean Sweep Task Force Team through Presidential Regulation No. 87 of 2016 Clean Sweep Task Force Team. The Clean Sweep Task Force Team has 4 (four) functions they are intelligence function, prevention function, enforcement function and justification function. This study reveals the implementation of Presidential Regulation No.87 of 2016 on Clean Sweep Task Force Team to eradicate the illegal levies in Sidoarjo. Socio-legal research method was used in this study. Socio-legal is a method with a interdisciplinary combination besides law and jurisprudence. The result shows that Sidoarjo Government through the Regent Decree No. 188/235/438.1.1.3/2018 Amendment to Regent Decree No. 188/678/404.1.1.3/2017 related to the Clean Sweep Task Force Team about Sidoarjo Government Management. Sidoarjo Clean Sweep Task Force Team has served according to its role on Article 3 in the Presidential Regulation No.87 of 2016 on Clean Sweep Task Force Team during one year.*

***Keywords :Illegal Levies, Clean Sweep TaskForce Team, Law Enforcement***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PEMBAHASAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB 2 KERANGKA TEORI</b>	
2.1. Korupsi .....	7
2.2. Definisi Punutan Liar .....	15
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	21
3.2. Sumber Hukum.....	23
3.3. Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Bahan Hukum .....	25

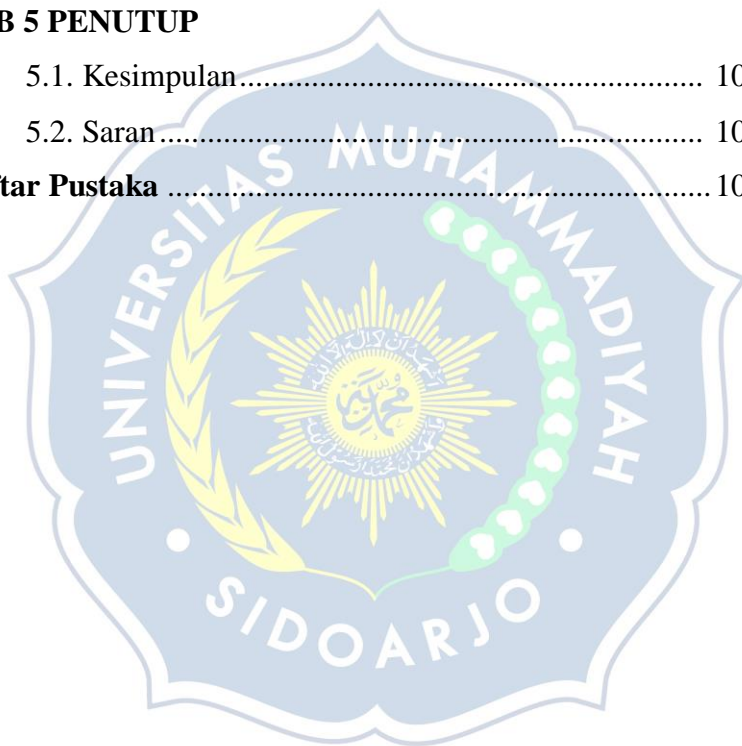
## **BAB 4 PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Satgas Saber Pungli .....	26
4.2. Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo .....	34
4.3. Analisa Implementasi Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo.....	40

## **BAB 5 PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	101
5.2. Saran.....	102

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>103</b>
-----------------------------	------------





## DAFTAR TABEL

4.1. Uraian Tugas Satgas Saber Pungli .....	33
4.2. Susunan Unit Dan Kelompok Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo .....	40
4.3. Data Sosialisasi Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo.....	42
4.4. Laporan Kegiatan Pokja Pencegahan.....	44
4.5. Laporan Hasil Kegiatan Pokja Penindakan.....	96



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Urgensi Pungutan Liar (Pungli) di Indonesia merupakan hal yang hingga saat ini masih menjadi tugas bagi pemerintah untuk diselesaikan.<sup>1</sup> Pelayanan publik sebagai ladang “basah” merupakan target utama bagi pemerintah untuk mencegah pungli. Warga Negara yang hak-hak pemenuhan kebutuhannya di jamin oleh Undang-Undang Dasar RI 1945,<sup>2</sup> pemerintah harus memberikannya dengan prima.<sup>3</sup> Berbicara tentang pelayanan publik prima merupakan keharusan pemberian pelayanan yang sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku tanpa memandang status penerima layanan.<sup>4</sup> Namun fenomena merubah makna prima menjadi pemberian pelayanan cepat dengan “syarat”. Birokrasi yang seperti ini, memberikan dampak

---

<sup>1</sup>Wahyu Ramadhani, “PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR TERHADAP PELAYANAN PUBLIK,” *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik* 12 (2017): 263–76.

<sup>2</sup>I Gede Sadia Dwi Ratmaja; I Ketut Keneng; I Ketut Sadjana, “HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT ( UNDANG-UNDANG NOMOR,” *Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)*, no. 3 (2000): 1–10.

<sup>3</sup>DR. Emrus, “Strategi Pelayanan Publik Yang Prima Oleh Aparat Pemda Banten,” *Strategi Pelayanan Publik Yang Prima Oleh Aparat Pemda Banten*, 2011, 145.

<sup>4</sup>“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,” 2016, 2–6.

negatif bagi kehidupan di masyarakat sehingga jauh dari kesejahteraan. Mereka yang tidak mampu dan miskin tidak dapat mengenyam pendidikan dengan baik, pelayanan kesehatan pun sulit dirasakan, belum lagi saat membutuhkan perizinan dan pelayanan lain yang kerap menjadi sasaran para oknum untuk pungli.<sup>5</sup> Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pungli dikategorikan sebagai modus atau salah satu bentuk dari korupsi.<sup>6</sup> Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tidak dijelaskan secara terang mengenai pungli, tetapi padanan untuk pungli adalah Pasal 368KUHP, Pasal 418KUHP, dan Pasal 423KUHP tentang penipuan, pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.

Pemerintah, dalam usahanya melakukan pemberantasan telah melakukan berbagai upaya. Seperti pada Orde Baru, tindakan represif yang dilakukan adalah dengan melakukan

Operasi Tertib melalui Instruksi Presiden R.I No. 9 Tahun 1977.<sup>7</sup> Keseniusan yang lain adalah dengan dibentuknya lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya

---

<sup>5</sup> Napitupulu Diana, *KPK In Action*. Jakarta; Raih Asa Sukses. 2010, hal.3

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi .Pasal 12 e

<sup>7</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945” 4, no. 1 (2002): 10.

disingkat KPK) dan lembaga khusus pemberantas pungli seperti Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (selanjutnya disingkat SATGAS SABER PUNGLI). Satgas Saber Pungli ini, disahkan pada tanggal 21 Oktober 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Presiden menilai urgensi pungli harus segera terselesaikan akibat kerugian yang diderita negara karena tindak pidana pungli, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2016 diadakan rapat koordinasi dengan seluruh gubernur se-Indonesia di Istana Negara.<sup>8</sup>

Tindak lanjut yang dilakukan oleh seluruh daerah di Indonesia adalah membentuk tim Satgas Saber Pungli pada masing-masing Kabupaten/Kota. Komitmen dan keseriusan ini, juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Melalui Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Bentuk nyata yang dilakukan oleh satgas adalah melakukan Operasi Tangkap Tangan (selanjutnya disingkat OTT) yang merupakan salah satu wewenangannya.<sup>9</sup> Hasil dari OTT ini adalah, tim satgas berhasil melakukan penangkapan perkatik pidana pungli yang dilakukan

---

<sup>8</sup><https://saberpungli.id/tentang>, diakses pada 10 April 2018 pukul 10.43 WIB

<sup>9</sup>Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar . Dictum 4



oleh Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pegawai pada Instansi Perijinan.<sup>10</sup> Pada kasus OTT PNS Disnakertrans, terdakwa diduga menerima pungli terkait proses izin penempatan tenaga kerja asing di Indonesia atau kartu izin tinggal sementara/tetap.<sup>11</sup> Dalam kasus OTT lain, Pegawai Dinas Perijinan menjadi terdakwa karena melakukan pungli dalam memberikan ijin SIUP. Bukti yang dikumpulkan adalah surat permohonan SIUP, surat permohonan ijin B3, surat permohonan ijin prinsip dari pemohon dan surat lain, selain itu ditemukan uang sejumlah Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).<sup>12</sup> Selama dibentuknya Satgas Saber Pungli pada tahun 2017, pungli yang ditangani oleh satgas sebanyak 5 (lima).<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat tema tersebut sebagai penelitian untuk menunjang penelitian sebelumnya terkait kedudukan Satgas Saber Pungli dalam “*Criminal Justice System*”. Dalam hal ini penelitian dibuat tidak hanya secara normatif tetapi lebih pada tataran praktis, maka

---

<sup>10</sup><https://www.liputan6.com/regional/read/2955983/tim-saber-pungli-tangkap-pns-sidoarjo-di-mal>, diakses pada 10 April 2018 pukul 11.25 WIB

<sup>11</sup><https://www.liputan6.com/regional/read/2955983/tim-saber-pungli-tangkap-pns-sidoarjo-di-mal>, diakses pada 13 April 2018 pukul 10.08 WIB

<sup>12</sup><http://www.kabarsidoarjo.com/2017/05/12/tim-saber-pungli-tangkap-staff-dinas-perijinan/> diakses pada 15 April 2018 pukul 11.45 WIB

<sup>13</sup><http://www.harianbhirawa.com/2018/03/kantor-saber-pungli-sidoarjo-dibiarkan-kosong> diakses pada 15 April 2018 pukul 11.45 WIB

pada penelitian ini akan menganalisis Satgas Saber Pungli di Kabupaten Sidoarjo, dengan judul penelitian; **Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Pada perumusan masalah ini, akan dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, sebagaimana berikut : Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penanggulangan pungutan liar di Kabupaten Sidoarjo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

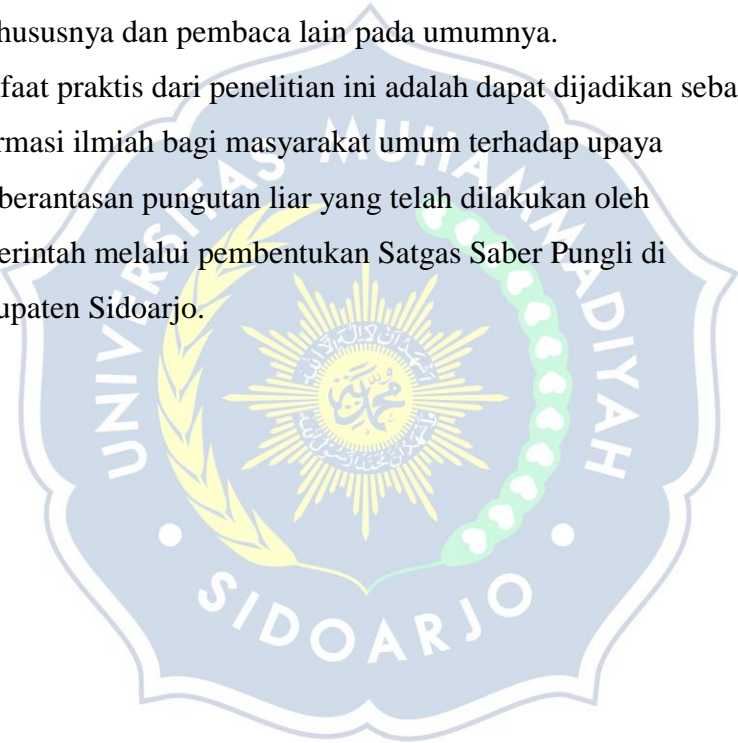
Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu dapat mengetahui implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penanggulangan pungutan liar di Kabupaten Sidoarjo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaatnya, sebagai berikut :

- A. Sebagai sumbangan referensi dan bahan masukan bagi penelitian- penelitian berikutnya
- B. Sebagai khasanah pengetahuan bagi mahasiswa hukum pada khususnya dan pembaca lain pada umumnya.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah bagi masyarakat umum terhadap upaya pemberantasan pungutan liar yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui pembentukan Satgas Saber Pungli di Kabupaten Sidoarjo.



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1 Korupsi

##### 2.1.1 Definisi Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” (Fodcema Andrea : 1951) “*corruptus*” (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruption*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*Corruption*” (Perancis) dan “*Corruptie* atau *Korruptie*” (Belanda).<sup>14</sup>

Makna korupsi merupakan penggunaan hak yang tidak menjadi haknya. Tujuan yang berorientasi personal tersebut, menjadikan pelaku korupsi rela menggunakan cara yang tidak dapat dibenarkan dengan dalih apapun.<sup>15</sup> Sependapat dengan Andi Hamza bahwa kata korupsi merupakan implikasi dari perbuatan yang bengis dan merupakan bentuk suatu kejahatan.<sup>16</sup> Menurut Kamus Umum Arab-Indonesia “*risywah*” artinya sama dengan Korupsi. Sependapat dengan Al-Misbah Al Munir al Fayumi, al Muhallah Ibnu Hazm bahwa korupsi berasal dari kata *Risywah*

---

<sup>14</sup> Kemendikbud.2011.*Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi*.Jakarta:Kemendikbud.hal. 23.

<sup>15</sup>Zulkarnain Umar, “Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik” I (2017): 1–13.

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm . 22-23



(suap) yang ditujukan sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi dengan menggunakan cara yang tidak dibenarkan.<sup>17</sup>

Muhammad Ali berpandangan bahwa korupsi memiliki pengertian, sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Korup artinya buruk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya,
2. Korupsi, artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok, dan sebagainya,
3. Koruptor, artinya orang yang melakukan korupsi

Istilah korupsi yang telah diterima pada perbendaharaan kata di Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran” yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian lainnya “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.<sup>19</sup>

### **2.1.2 Bentuk-Bentuk Korupsi**

Walaupun secara umum perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara dan dilakukan oleh seseorang yang ingin memperkaya dirinya ataupun kelompok

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 23.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 24.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 24.

yang dilakukan secara personal ataupun secara terstruktur dan cara yang ditempuh tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, perbuatan tindak pidana korupsi tersebut, tidak terbatas pada perbuatan korupsi itu sendiri.<sup>20</sup> Namun terbagi menjadi berbagai macam bentuk, dalam buku pendidikan anti korupsi disebutkan bahwa bentuk-bentuk korupsi diantaranya seperti kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.<sup>21</sup>

Kerugian keuangan negara, merupakan salah satu bentuk dari korupsi yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain baik dilakukan secara personal ataupun korporasi. Perbuatan tersebut, dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ataupun dengan menggunakan sarana yang telah ada namun tidak sesuai dengan peruntukannya.<sup>22</sup> Kerugian keuangan negara tersebut masuk

---

<sup>20</sup>M Fajar Hidayanto, “KEPEMIMPINAN DAN KORUPSI ( SIMBIOSIS MUTUALISME ),” *KEPEMIMPINAN DAN KORUPSI ( SIMBIOSIS MUTUALISME )* XIII (2005): 34–43.

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 25

<sup>22</sup>I Made Adi Setaya, “Oleh : I MADE ADI SERAYA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA ABSTRACT,” *Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Universitas Udayana, 2012).

dalam kategori korupsi dikarena keadaan hilangnya uang negara baik hilang secara disengaja ataupun dikarenakan kelalaian.<sup>23</sup>

Bentuk lain dari korupsi selain kerugian keuangan negara adalah suap menyuap. Pemaknaan suap merupakan “*sesuatu yang disuapkan; hasil menyuap (menyogok); uang suap*”.<sup>24</sup> Suap tidak mungkin terjadi apabila tidak ada timbal balik dalam maksud kedua belah pihak, hal ini dikarena kedua belah pihak saling memiliki kepentingan atau saling membutuhkan. Tidak cukup sebatas kebutuhan antar pihak saja, namun terdapat satu pihak yang memiliki kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam menjalankan kewenangan tersebut.<sup>25</sup> Berdasarkan buku tentang pendidikan anti korupsi, dijelaskan bahwa suap dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang memberikan berupa hadiah ataupun menjanjikan sesuatu yang berhubungan dengan kewenangan, kewajiban ataupun jabatannya kepada seseorang. Seseorang sebagai subjek tersebut tidak sebatas Pegawai Negeri Sipil saja namun juga seorang hakim maupun advokat. Misal suap yang dilakukan kepada

---

<sup>23</sup>Hamzar Nodi, “Pertanggungjawaban Pejabat Administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Pada Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Pertanggungjawaban Pejabat Administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Pada Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi* 3, no. 1 (n.d.).

<sup>24</sup> Situs Resmi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.mendikbud.go.id> pencarian dengan kata kunci Suap.

<sup>25</sup>Intan Yunasri Purwita, “UNSUR KERUGIAN NEGARA AKIBAT PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI,” 2014, Kerugian, keuangan Negara, Korupsi.

seorang hakim dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Atau pada advokat, dimungkinkan terjadi suap menyuap dengan maksud agar advokat tersebut dapat menghadiri atau tidak menghadiri sidang, ataupun agar dapat mempengaruhi pemberian nasihat atau pendapat yang berhubungan dengan penyelesaian perkara.

Penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk korupsi selanjutnya, merupakan perbuatan menyimpang lainnya yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil ataupun selain itu. Pada jenis ini, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi seperti:<sup>26</sup>

1. Pegawai Negeri Sipil atau orang selain Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penggelapan (memalsukan, mengilangkan, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, dan memalsu);
4. Uang, surat berharga, ataupun barang;
5. Menguasai dalam jabatannya.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tersebut diatas apabila dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil atau orang selain itu, dapat dikenai hukuman dan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.<sup>27</sup> Namun apabila Pegawai Negeri Sipil paham dengan tugas mereka sebagai pelayan masyarakat, tindak penggelapan dalam jabatan tidak mungkin terjadi. Konsekuensi yang harus dibayarkan adalah menjadi pegawai dengan integritas yang tinggi. Integritas tersebut hanya akan bisa dimiliki oleh pegawai yang memiliki tingkat kepedulian dan kepekaan yang tinggi, tingkatan kepekaan tersebut bersumber dari kepribadian dari masing-masing individu.<sup>28</sup>

Selain ketiga bentuk korupsi diatas, bentuk korupsi yang lain adalah pemerasan. Pemerasan berasal dari kata memeras yang dapat diartikan sebagai perbuatan dengan usaha mengambil untung sebanyak-banyaknya dari orang lain, atau dengan cara meminta uang dan sebagainya yang disertai dengan ancaman.<sup>29</sup> Sederhananya tindakan pemerasan adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan adanya unsur memaksa, dan disertai ancaman atau dilakukan dengan menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang

---

<sup>27</sup>Presiden Republik Indonesia, 'Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Tidana Korupsi', 2001, Pasal 8-10

<sup>28</sup>Muhammad Mustofa and Kata Kunci, "SUAP MENYUAP DAN MAFIA PERADILAN DI INDONESIA : TELAAH KRIMINOLOGIS," 2000, 1-5.

<sup>29</sup>Situs Resmi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.mendikbud.go.id> pencarian dengan kata kunci Pemerasan.



kepunyaan orang lain untuk dimilikinya (dalam hal ini berkaitan dengan pemberian hutang atau piutang). Tindakan tersebut dilakukan secara sadar.<sup>30</sup>

*Kelima* perbuatan curang, menurut buku pendidikan anti korupsi perbuatan curang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pemborong ahli bangunan pada saat melakukan pembangunan pada bangunan melakukan perbuatan curang dan dapat dimungkinkan menjadi penyebab ancaman bahaya bagi orang lain atau barang, dan bisa juga sebagai ancaman bagi keselamatan negara. Tidak terbatas pada subjek tersebut di atas, perbuatan curang juga dimungkinkan dapat dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pengawasan dan memiliki kewenangan untuk itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan curang terjadi padahal dia mengetahuinya, dapat juga dikategorikan sebagai korupsi. Barang yang dimaksudkan sebagai objek di atas tidak terbatas pada barang bangunan saja, tetapi barang dimaksud dapat juga sebagai barang keperluan TNI atau Kepolisian. Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan ditujukan sebagai bentuk mencari keuntungan bagi diri sendiri.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ariesta Pratama dan Supriyadi, "KEPRIBADIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERINTEGRITAS BERDASARKAN TEORI EYSENCK Ariesta Handoko Pratama Dan Supriyadi" 1, no. 3 (2014): 74–87.

<sup>31</sup> Erick Betra Spetiadi, "Upaya Penanggulangan Oleh Sat Reskrim Polres Lampung Terhadap Kejahatan Pemerasan Yang Dilakukan Kelompok Preman Di Jalan Lintas Timur," n.d.

*Keenam* Benturan kepentingan dalam pengadaan, merupakan salah satu bentuk dari korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara. Penagadaan barang dan jasa yang selama ini menjadi ladang korupsi yang subur, tetap menjadi titik perhatian pemerintah agar dapat diselesaikan. Korupsi pada jenis ini, sangat mudah untuk dilakukan, kerana yang terlibat didalamnya memiliki kendali dalam membuat keputusan dengan kewenangannya. Penyimpangan pada bentuk korupsi ini, dapat terjadi pada tiap-tiap tahap pengadaan dan sepakat dengan Antasari Azhari yang mengkalsifikasikan modus operadi dalam pengadaan menjadi 18 (delapan belas) bagian , misal pada kelengkapan dokumen lelang yang tidak dilengkapi dengan baik, tidak ada transparansi dalam penentuan HPS, memiliki tendensi dalam menentukan spesifikasi, pengusaha mempengaruhi kepala daerah untuk melakukan intervensi dalam proses pengadaan dengan memenangkan tender pada perusahaan tertentu atau melakukan *mark-up* pada harga dengan menaikkan harga yang selisihnya akan dibagi-bagikan kepada kelompok.<sup>32</sup>

Bentuk korupsi yang terakhir adalah gratifikasi. Pada wilayah pelayanan publik, gratifikasi merupakan hal yang sangat

---

<sup>32</sup>Retno Andreas, "Peranan Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Pekanbaru Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbuatan Curang Yang Dilakukan Ole Calo Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kota Pekanbaru" II (2015): 1–15.

mudah untuk ditemukan. Adanya hubungan saling membutuhkan antara pegawai atau penyelenggara negara sebagai pemberi jasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa dapat menciptakan siklus suap. Pemberian yang diberikan pengguna jasa sebagai upaya untuk melancarkan hajatnya agar penyedia jasa dapat melakukan atau tidak melakukan kewajiban tugasnya, hal ini juga berhubungan dengan jabatannya.<sup>33</sup> Namun apabila pemberian barang yang selama ini berlaku dimasyarkat sebagai bentuk terima kasih dan pada saat itu pemberi jasa tidak dengan niat menerima pemberian tidak bermaksud sebagai gratifikasi tersebut, maka hasil penerimaan barang tersebut dapat dilaporkan kepada KPK dalam rentang waktu 30 hari setelah menerima.<sup>34</sup>

## **2.2 Definisi Pungutan Liar**

Pungutan liar yang selanjutnya disingkat pungli, merupakan fenomena yang belum terselesaikan dalam permasalahan pemerintah. Berikut pengertian pungli menurut beberapa para ahli :

1. Menelusuri isitlah pungli Soedjono menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina; “Li” artinya

---

<sup>33</sup> Amiruddin, “ANALISIS POLA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH” 8, no. 1 (2012): 26–37.

<sup>34</sup> Zulkarnain Umar, “Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik.”

keuntungan; “Pung” artinya persembahan. Jadi pungli adalah mempersembahkan keuntungan.<sup>35</sup>

2. Menurut Moh.Toha Solahuddin, pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai aatau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran.<sup>36</sup>
3. Menurut Kotapaja, pungli adalah pungutan tidak resmi yang tidak dilindungi oleh peraturan pemerintah dan undang-undang.

Jadi berdasarkan pengertian dari para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa pungli merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau Pegawai Negeri meminta pembayaran yang tidak berdasarkan peraturan dan digunakan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.

Mengakarnya budaya praktik pungli ini, berdampak pada toleransi masyarakat terhadap praktiknya. Padahal, masyarakat kita paham bahwa tindakan tersebut merugikan diri mereka dan

---

<sup>35</sup>David Daniel Paruntu, “Tolok Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi,” *Tolok Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi* III, no. 2 (2014). Hlm. 1

<sup>36</sup>Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Tidana Korupsi,” no. 1 (2001): 1–19.

negara, namun mentalitas berfikir masyarakat kita adalah asal urusan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik. Hubungan timbal balik yang baik antara masyarakat dan oknum pungli dapat dijadikan salah satu faktor masih eksisnya pungli dalam birokrasi kita. Dewasa ini *das sein* dalam kehidupan masyarakat merupakan bukti bahwa pelayanan publik yang seharusnya prima menjadi pelayanan yang apa adanya.<sup>37</sup>

Hukum sebagai peraturan yang dibuat untuk keamanan dan ketertiban terpelihara,<sup>38</sup> seolah hanya menjadi tatanan teori saja. Namun tetap, jauh sebelum itu KUHP kita telah mengatur tentang tindak pidana pungli yang dipersamakan dengan tindak pidana pemerasan (pasal 368), gratifikasi/hadiah (pasal 418) dan menyalahgunakan wewenang (pasal 423). Setelah adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan dalam pasal 12 e bahwa :

*Dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp*

---

<sup>37</sup>Tin Hulukati, "Pungutan Liar (Pungli), Jenis Tindak Pidana Kriminalitas Tergolong Berat," n.d.

<sup>38</sup> Prof.Dr.M.Bakri.,S.H.,M.S, *Pengantar Hukum Indonesia:Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid I*. 2013.UB Press. Cet II. Hal 10



200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

*e. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima sesuatu bagi dirinya sendiri.*

Melalui pasal tersebut pungutan liar dapat dijerat dan dikategorikan sebagai modus dari korupsi.

Seiring berkembangnya waktu, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 mengkhususkan penindakan pencegahan pungutan liar melalui pembentukan Satgas Saber Pungli. Untuk Menjalankan tupoksinya, satgas memiliki 4 (empat) fungsi yaitu sebagai Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi. Satgas *Intelijen* bertugas melakukan pemetaan pada instansi-instansi yang rawan terjadi pungli. Pada bagian ini, satgas dapat melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai pihak terkait pungli. Satgas selanjutnya yaitu *Pencegahan*, dimana dalam hal ini satgas dapat melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif dan edukatif. Contoh upaya yang dapat dilakukan adalah kegiatan sosialisasi, penyuluhan maupun pelatihan. Selain satgas

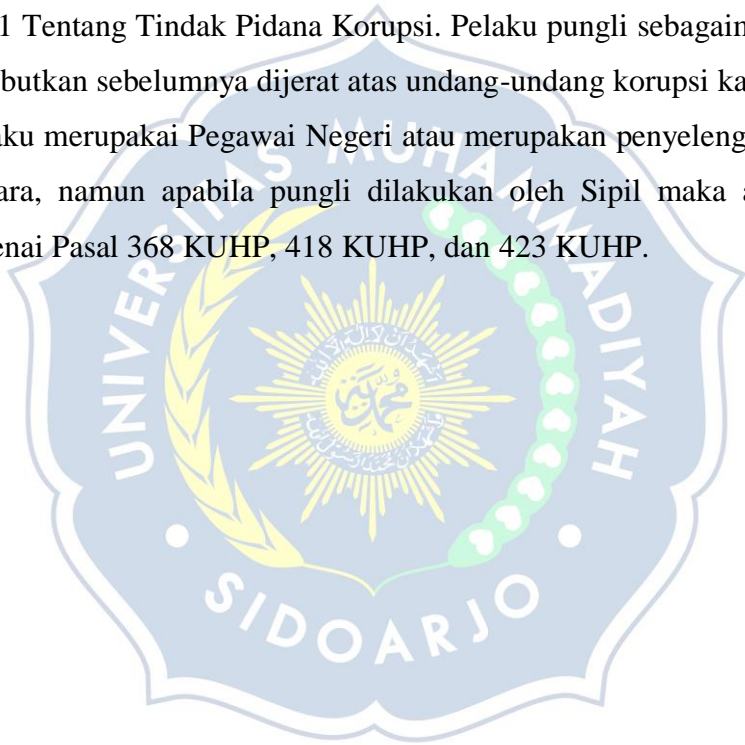
tersebut, terdapat satgas dengan fungsi yang lain yaitu *Penindakan*, pada satgas ini kewenangannya lebih pada upaya represif. Satgas penindakan dapat menerima laporan dari masyarakat dengan melalui teknologi informasi yang telah ada baik media sosial atau aduan secara langsung. Selain itu, satgas penindakan dapat melakukan koordinasi untuk merencanakan dan melakukan Operasi Tangkap Tangan (selanjutnya disingkat OTT). Satgas terakhir adalah *Yustisi*, satgas yustisi merupakan bagian yang menjadi penentu. Penentu dalam hal ini adalah dengan memberikan rekomendasi terkait sanksi yang akan diberikan kepada pelaku pungli. Satgas *Yustisi* dapat membantu tugas kehakiman dalam upaya pemberantasan pungli. Upaya yang dapat dilakukan, salah satu caranya adalah dengan melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penahanan.<sup>39</sup>

Pelayanan publik menjadi tempat yang paling rawan terjadi praktik pungli, dalam hal ini Satgas Saber Pungli Kabupaten

---

<sup>39</sup> Kewenangan Satgas Saber Pungli: (a)membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, (b)melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, (c)mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, (d)melakukan operasi tangkap tangan, (e) memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, (f)memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/kelembagaan dan kepala pemerintahan daerah, serta (g)melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar

Sidoarjo melakukan OTT sebagai kewenangannya.<sup>40</sup> Penangkapan terhadap Pegawai Negeri yang bertugas di Disnakertrans dan Dinas Perijinan dilakukan karena pelaku melakukan pungli. Pungli yang dilakukan dapat dijerat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Pelaku pungli sebagaimana disebutkan sebelumnya dijerat atas undang-undang korupsi karena pelaku merupakan Pegawai Negeri atau merupakan penyelenggara negara, namun apabila pungli dilakukan oleh Sipil maka akan dikenai Pasal 368 KUHP, 418 KUHP, dan 423 KUHP.



---

<sup>40</sup> Keputusan Bupati Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

##### **3.1.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan metode sosio legal, maka pendekatan yang digunakan juridis sosiologis. Pendekatan ini dilengkapi dengan pendekatan lainnya yang masih bersesuaian dengan permasalahan penelitian ini, diantaranya :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>41</sup> Pendekatan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden No.87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, dan Keputusan Bupati Nomor 188/235/438.1.1.3/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

---

<sup>41</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 164.

## b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>42</sup> Pada penelitian ini kasus yang diambil adalah kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pungutan liar di Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara.

Metode Penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data-data tertentu dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Atau seperangkat aturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh peneliti. Metode *sosio legal* adalah metode penelitian yang mendekati suatu masalah melalui penggabungan antara analisa normative dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum.<sup>43</sup> Sosio legal sebenarnya konsep payung yang memayungi segala pendekatan terhadap hukum, proses hukum ataupun sistem hukum. Sosio legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang ada dalam maupun ilmu sosial, yang termasuk didalamnya ilmu lainnya yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum seperti pembelajaran

---

<sup>42</sup>*ibid.* hlm. 165

<sup>43</sup>[http://www.ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode20%Penelitian20%Sosio20%Legal.html](http://www.ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar%20Kuliah%20Metode20%Penelitian20%Sosio20%Legal.html), diakses pada 15 April 2018 pukul 9.55 WIB



asas-asas, doktrin-doktrin dan herarki perundang-undangan.<sup>44</sup>

Dengan memasukkan fakta-fakta social tentang fenomena penegakan pungutan liar di Sidoarjo dengan mengkaji peran satgas saber pungli dalam upaya pemberantasan, disesuaikan dengan keberadaan perundang-undangan.

### 3.2 Sumber Hukum

Penelitian hukum sosio legal menggunakan dua macam sumber data, yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

#### a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan,<sup>45</sup> dalam penelitian ini yang menjadi sumber hukum primer memiliki korelasi dengan lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Sidoarjo maka tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo yang menjadi narasumber. Informasi dari tim Satgas Saber Pungli akan diperoleh melalui wawancara.

#### b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium

---

<sup>44</sup> Herlambang Twiratama, *Makalah Penelitian Sosio Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*. Hlm. 1

<sup>45</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*. CV Alfabeta.2017. Hlm.71

mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini, juga akan menggunakan jurnal-jurnal terkait sebagaimana tertera dalam setiap *footnote*, dokumen-dokumen terkait kasus pungli di Kabupaten Sidoarjo yang berasal dari Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo. Selain tersebut diatas, penelitian ini akan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait Satgas Saber Pungli, seperti :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368, Pasal 418, dan Pasal 423;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dan
- d. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/235/438.1.1.3/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo.

---

<sup>46</sup>*Ibid.* Hlm. 296

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini, analisis yang digunakan berupa analisis induktif. Beranjak dari pemaparan realitas yang bersifat spesifik dilanjutkan dengan penggambaran umum (pengambilan kesimpulan) tentang fakta dan penelitian atas realitas tersebut.<sup>47</sup> Teknik pengumpul data yang digunakan adalah komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung.<sup>48</sup>

- a. Komunikasi langsung, yaitu dengan melakukan kontak langsung dengan sumber data dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data.
- b. Komunikasi tidak langsung, yaitu kontak tidak langsung terhadap sumber pengumpul data dengan menggunakan rekap-rekap data dan sumber berita dari majalah atau internet.

---

<sup>47</sup> <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>, diakses pada tanggal 19 April 2018 pukul 9.46

<sup>48</sup> Sofia Achnes, "Pelayanan Prima Sebagai Upaya Pelaksanaan Good Government," *Pelayanan Prima Sebagai Upaya Pelaksanaan Good Government* 3 (2012): 27–37. 14.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Satgas Saber Pungli**

Kehidupan masyarakat yang plural, menciptakan kompleksitas dalam berinteraksi setiap kalinya. Perkembangan pengetahuan dan peningkatan kebutuhan hidup pada masing-masing individu yang tidak dibarengi oleh pemerataan, kekuatan iman dan kejujuran menimbulkan munculnya kejahatan. Kejahatan tersebut dilakukan baik secara terorganisir maupun secara individu, ataupun dalam skala.<sup>49</sup> Pungli dinilai sebagai kejahatankarena menimbulkan kerugian, sehingga membawa harapan pemerintah dapat membuat aturan yang dapat menyelesaikan tindak pidana pungli tersebut.

Pemerintah dalam hal mencukupi kebutuhan pemberantasan tindak pidana tersebutmembentuk tim yang tugasnya difokuskan pada pemberantasan tindak pidana pungutan liar. Pada tanggal 20 Oktober 2016 Presiden Republik Indonesia mengambil langkah dengan melakukan diskusi serius tentang pembentukan Satgas Saber Pungli di Istana Negara bersama dengan gubernur seluruh Indonesia.<sup>50</sup> Selanjutnya sebagai legalitas tugas satgas pada

---

<sup>49</sup>(Tin Hulukati, n.d.)

<sup>50</sup> [www.saberpungli.id](http://www.saberpungli.id) , diakses pada tanggal 5 Mei 2018 pukul 08.32 WIB

tanggal 21 Oktober 2016 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar disahkan.<sup>51</sup> Satgas saber pungli bertanggungjawab langsung kepada Presiden.<sup>52</sup>

Keanggotaan satgas saber pungli ini melibatkan berbagai unsur yang terdiri dari<sup>53</sup>:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- b. Kejaksaan Agung,
- c. Kementerian Politik Hukum dan Keamanan,
- d. Kementerian Dalam Negeri,
- e. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- f. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,
- g. Ombudsman Republik Indonesia,
- h. Badan Intelijen Negara, dan
- i. Tentara Nasional Indonesia.

Susunan keanggotaan sesuai dengan Pasal 5, terdiri atas:<sup>54</sup>

- a. Pengendali/ Menter Koordinator Bidang Politik,  
Penanggung Hukum dan Keamanan  
Jawab

<sup>51</sup>Dalam Upaya et al., “Uin Alauddin Makassar 2017,” 2017.

<sup>52</sup>(“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar” 2016) Pasal 1 ayat (2)

<sup>53</sup>Juli Antoro Hutapea, “Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU.RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi J.o UU RI Nomor 20 Tahun 2001),” n.d.

<sup>54</sup>Upaya et al., “Uin Alauddin Makassar 2017.”



- b. Ketua Inspektur Pengawasan Umum  
Pelaksana Kepolisian Negara Republik  
Indonesia
- c. Wakil Ketua Inspektur Jenderal Kementerian  
Pelaksana I Dalam Negeri
- d. Wakil Ketua Jaksa Agung Muda Bidang  
Pelaksana II Pengawasan
- e. Sekertaris Staf Ahli di lingkungan Kementerian  
Koordinator Bidang Politik, Hukum  
dan Keamanan
- f. Anggota
1. Kepolisian Negara Republik  
Indonesia
  2. Kejaksaan Agung
  3. Kementerian Dalam Negeri
  4. Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia
  5. Pusat Pelaporan dan Analisis  
Transaksi Keuangan
  6. Ombudsman Republik  
Indonesia
  7. Badan Intelijen Negara
  8. Polisi Militer Tentara Nasional  
Indonesia

Dari keanggotaan tersebut, Satgas menjalankan 4 (empat) fungsi yaitu fungsi intelijen, fungsi pencegahan, fungsi penindakan serta fungsi yustisi.<sup>55</sup> Sedangkan kewenangan yang diberikan kepada Satgas Saber Pungli sebagai perwujudan salah satu program Nawacita, maka wewenangnyanya sebagai berikut :

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli,
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi,
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli,
- d. Melakukan operasi tangkap tangan,
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara

---

<sup>55</sup>“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,” 2016, 2–6.

pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah, dan

g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungli.

Pada Rakor Persiapan KPK di Jakarta, terdapat materi tentang Satgas Saber Pungli yang didalamnya terdapat penjabaran tentang Tupoksi pada tiap-tiap anggota dan Pokja, sebagai berikut:<sup>56</sup>

Pejabat	Tugas
Menkopolhukkam Pengendali/Penang gung Jawab	Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Presiden
Ketua Pelaksana Irwasum Polri	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat rencana strategis dalam rangka penjabaran kebijakan Presiden.</li><li>2. Melaporkan kegiatan satgas kepada Menko Polhukam secara periodic setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal bersifat khusus dan kontijensi.</li><li>3.</li></ol>

---

<sup>56</sup> Kemenko Polhukam, 'Satgas "saber Pungli"', in *Satgas Saber Pungli*, 2016.

	<p>Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas.</p> <p>4.</p> <p>Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh sub satgas.</p>
Kelompok Ahli	<p>Memberikan masukan dan saran kepada Kasatgas berkaitan dengan tugas satgas dan memberikan asistensi terhadap perencanaan pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan satgas.</p>
Sekretaris	<p>Membantu pelaksanaan tugas Kasatgas dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 6 Kepala Bidang, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bidang Operasi;</li> <li>Bidang Logistik;</li> <li>Bidang Administrasi Umum;</li> <li>Bidang Keuangan</li> <li>Bidang Data dan Informasi;serta</li> </ol>

	f. Bidang Publikasi Umum
Kelompok Kerja Intelijen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operadi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku Pungli;</li> <li>2. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;</li> <li>3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana satgas;</li> <li>4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas;</li> </ol>
Kelompok Kerja Pencegahan	Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam

	rangka mencegah terjadinya Pungli
Kelompok Kerja Penindakan	Melakukan upaya-upaya represif (OTT) sesuai kewenangannya terhadap para pelaku pungli di seluruh K/L yang memberikan pelayanan publik
Kelompok Kerja Yustisi	Memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana sesuai kewenangannya.

Table 4.1 Uraian Tugas Satgas Saber Pungli

Formasi keanggotaan, uraian tugas pokok dan fungsi dan kewenangan tersebut sangat menunjang tugas yang dibebankan kepada satgas sebagai pemberantas tindak pidana pungli yang efektif dan efisien, dan dalam melaksanakan tugasnya satgas dapat dibantu oleh tim saber pungli pada tiap-tiap daerah.

## 4.2 Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo

Program Nawacita sebagai program prioritas pembangunan yang dipilih oleh Presiden guna mewujudkan Negara Indonesia



yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian membawa reformasi pada berbagai bidang salah satu contohnya pada bidang hukum. Reformasi dalam bidang tersebut memiliki 3 pilar utama yaitu, penataan regulasi, pembenahan lembaga/aparat penegak hukum serta pembangunan budaya hukum menciptakan budaya hukum yang kuat. Sedangkan prioritas pada reformasi tersebut adalah pemberantasan pungutan liar, pemberantasan penyelundupan, percepatan pelayanan SIM, STNK, SKCK, relokasi Lapas serta perbaikan layanan hak paten, merk dan desain. Presiden menilai pungli sebagai perusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera. Sebagai pelaksanaannya, Presiden menilai perlu dibentuk satuan tugas<sup>57</sup>.

Sidoarjo sebagai Kabupaten yang mendukung program-program pemerintah, menindaklanjuti hal tersebut dengan membentuk tim satgas saber pungli Kabupaten Sidoarjo, yang dikukuhkan oleh Bupati Sidoarjo pada tanggal 2 Februari 2017 di Aula Delta Graha Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo<sup>58</sup>. Kewenangan saber pungli dalam memberantas pungli di wilayah Sidoarjo, tercantum pada Keputusan Bupati Nomor

---

<sup>57</sup>“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.”

<sup>58</sup>[www.dprd-sidoarjo.kab.go.id](http://www.dprd-sidoarjo.kab.go.id), diakses tanggal 29 Mei 2018 pukul 4:22 WIB

188/678/404.1.1.3/2017 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo dan mengalami perubahan pada lampiran dengan Keputusan Bupati Nomor 188/235/438.1.1.3/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam berorganisasi, satgas saber pungli Kabupaten Sidoarjo memiliki visi dan misi. Visi satgas saber pungli Kabupaten Sidoarjo adalah Terwujudnya pelayanan publik pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terbebas dari pungutan liar, sedangkan misi satgas sebagai berikut:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dari Kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat;
4. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.

Keanggotaan Satgas saber pungli berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/235/438.1.1.3/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Unit	
Pengendali	1. Bupati Sidoarjo; 2. Wakil Bupati Sidoarjo; 3. Kepala POLRESTA Sidoarjo; 4. Komandan Distrik Militer 0816 Sidoarjo; 5. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
Ketua Pelaksana	Wakil Kepala POLRESTA Sidoarjo
Wakil Ketua	6. Inspektur Kabupaten Sidoarjo; 7. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;

	8. Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Sekretaris	5. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sidoarjo; 6. Kepala Seksi Pengawasan pada POLRESTA Sidoarjo.
<b>Kelompok Kerja</b>	
<b>Kelompok Kerja Intelijen</b>	
Ketua	Kepala Satuan Intelijen Keamanan dari POLRESTA Sidoarjo
Anggota	1. Perwira Seksi Intel dari Komando Distrik Militer 0816 Sidoarjo; 2. Staf Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo; 3. Inspektur Pembantu IV;
<b>Kelompok Kerja Pencegahan</b>	

Ketua	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat dari POLRESTA Sidoarjo
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;</li> <li>2. Inspektur Pembantu III;</li> <li>3. Kepala Bidang Mutasi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;</li> <li>4. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sidoarjo;</li> </ol>
<b>Kelompok Kerja Penindakan</b>	
Ketua	Kepala Satuan Reserse Kriminal dari POLRESTA Sidoarjo

Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komandan Sub Denpom V/4-1 Sidoarjo;</li> <li>2. Kepala Seksi Profesi Pengamanan pada POLRESTA Sidoarjo;</li> <li>3. 1 (satu) orang Jaksa Fungsional Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;</li> <li>4. Inspektur Pembantu I;</li> <li>5. Kepala Unit Tipikor dari POLRESTA Sidoarjo</li> </ol>
<b>Kelompok Kerja Yustisi</b>	
Ketua	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang Jaksa Fungsional Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;</li> <li>2. Kepala Sub Bagian Hukum pada POLRESTA Sidoarjo;</li> <li>3. Inspektur Pembantu II;</li> <li>4. 1 (satu) orang PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten</li> </ol>



	Sidoarjo; 5. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo
<b>Pembantu Adminsitasi</b>	
Anggota	1. 2 (dua) orang Staf Inspektorat Kabupaten Sidoarjo; 2. 2 (dua) orang Anggota Kepolisian pada Seksi Pengawasan POLRESTA Sidoarjo.

Table 4.2 Susunan unit dan kelompok Satgas Saber Pungli Sidoarjo

### 4.3 Analisa Implementasi Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo

Satgas Saber Pungli sebagai organisasi tentunya memiliki program kerja yang pada prinsipnya bersesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Berdasarkan hasil penelitian pada satgas, masing-masing Pokja juga memiliki program kerja dan terdapat evaluasi berkala terhadap program kerja tersebut. Kegiatan periodik satgas yang lain adalah rapat koordinasi yang dihadiri

oleh setiap anggota, dan dilakukan setiap bulan. Berdasar hasil penelitian, rapat koordinasi dilakukan di kantor bersama satgas yang bertepatan di Kantor Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan pembahasan terkait program dan evaluasi kinerja satgas. Selain rapat rutin atau rapat koordinasi, terdapat beberapa rapat lain yaitu rapat insidentil dan rapat yang dilakukan oleh masing-masing pokja. Rapat-rapat tersebut dilakukan diluar jadwal dan dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan. Selain kegiatan rapat-rapat tersebut, didasari oleh hasil wawancara dengan salah satu tim Satgas Saber Pungli, terdapat kegiatan analisa dan evaluasi kinerja (selanjutnya disingkat Anev). Anev tersebut dilakukan pada tiap bulan, yang bertujuan sebagai acuan peningkatan kinerja pada waktu berikutnya. Kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan Pasal 4 huruf g.<sup>59</sup>

Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo, dalam menjalankan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi memiliki pokja-pokja diantaranya pokja intelijen, pokja pencegahan, pokja penindakan dan pokja yustisi.

---

<sup>59</sup>Kemenko Polhukam, "Satgas 'saber Pungli,'" in *Satgas Saber Pungli*, 2016.

### 4.3.1 Kelompok Kerja Pencegahan

Kelompok Kerja Pencegahan memiliki tugas mengadakan upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada setiap lini masyarakat, baik masyarakat luas dan pejabat ataupun pekerja pada instansi-instansi pemerintahan. Selain itu bentuk upaya lain sebagai pencegahan preventif adalah dengan mengadakan penyuluhan maupun pelatihan dengan sasaran yang tidak terbatas seperti pada masyarakat awam, pelajar ataupun mahasiswa. Setelah melakukan penelitian, kami mendapatkan data yang membuktikan bahwa satgastelah melakukan tugas sosialisasi pada berbagai dinas dan masyarakat dalam rentang April hingga Mei 2018. Berikut tabel data sosialisasi yang dilakukan Satgas Saber Pungli:<sup>60</sup>

APRIL	MEI	JUMLAH
16	22	38

Tabel 4.3 Data Sosialisasi Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo 2018

Tabel diatas membuktikan bahwa pada pokja pencegahan telah melaksanakan programnya dengan baik. Komitmen dan integritas yang kuat pada masing-masing anggota dalam melaksanakan tugasnya, dapat dilihat dari antusias para anggota dalam

---

<sup>60</sup> Laporan Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018, diambil dari pokja pencegahan pada tanggal 3 Juni 2018, Pukul 15:45.

melaksanakan tugas. Walaupun masing-masing anggota memiliki kesibukan pada instansinya, tim pokja pencegahan seluruhnya dapat meluangkan waktunya untuk melakukan giat sosialisasi pungli. Untuk lebih lengkapnya, tabel di bawah ini merupakan kegiatan sosialisasi sebagai bentuk pencegahan pungli yang telah dilakukan oleh pokja pencegahan selama April sampai dengan Mei 2018.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> Laporan Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018, diambil dari pokja pencegahan pada tanggal 3 Juni 2018, Pukul 15:45

**LAPORAN HASIL KEGIATAN POKJA PENCEGAHAN**  
**UNIT SATGAS SABER PUNGLI SIDOARJO PERIODE APRIL s/d MEI 2018**

<b>N O</b>	<b>UPP PROV/KA B/KOTA</b>	<b>WAKTU PELAKSAN A-AN</b>	<b>TEMPAT PELAKSANA AN</b>	<b>PESERTA</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>APRIL 2018</b>					
1	Kab, Sidoarjo	Senin, 16 April 2018 Pukul 08.00 WIB	Ruang Vidcon POLRESTA Sidoarjo	Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek jajaran Polresta Sidoarjo	Giat sosialisasi Kasatbinmas Polresta Sidoarjo Selaku Kapokja Pencegahan Unit Satgas

					<p>Saber Pungli Sidoarjo tentang “Bersama Ciptakan Sidoarjo Bebas Pungli Pada Tempat Pelayanan Publik”</p>
2	Kab.Sidoarjo	<p>Selasa, 17 April 2018 Pukul 09.00 WIB</p>	<p>Tempat Pelayanan Publik SKCK POLRESTA Sidoarjo</p>	<p>Para Pemohon/Masyarakat dan Petugas Pelayanan</p>	<p>Giat Sosialisasi Kapokja Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli</p>



					Sidoarjo tentang bebas pungli pada tempat pelayanan publik
3	Kab.Sidoarj o	Kamis, 19 April 2018 Pukul 10.00 WIB	Tempat Pelayanan Publik Satlantas POLRESTA Sidoarjo (Ruang Laka Lantas)	Masyarakat dan Petugas Pelayanan	Giat Sosialisasi Kapokja Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo tentang “Sidoarjo Bebas Pungli pada Tempat

					Pelayanan Publik”
4	Kab.Sidoarjo	Jumat, 20 April 2018 Pukul 08.00 WIB	Ruang Tilang Satlantas POLRESTA Sidoarjo	Petugas Pelayanan	Giat Sosialisasi Kapokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Sidoarjo tentang “Sidoarjo Bebas Pungli pada Tempat Pelayanan Publik”
5	Kab.	Jumat, 20	Ruang Rapat	Petugas Pelayanan	Giat Sosialisasi

	Sidoarjo	<p>April 2018</p> <p>Pukul 08.00</p> <p>WIB</p>	<p>Dishub</p> <p>Kab.Sidoarjo</p>	<p>Pembantu III</p> <p>Inspektorat</p> <p>Kab.Sidoarjo</p> <p>selaku anggota</p> <p>pokja</p> <p>pencegahan unit</p> <p>Satgas Saber</p> <p>Pungli Sidoarjo</p> <p>tentang Sidoarjo</p> <p>bebas pungli</p> <p>pada tempat</p> <p>pelayanan</p> <p>publik terhadap</p> <p>para petugas</p>
--	----------	---	-----------------------------------	--

					<p>pelayanan pada kantor Dishub Kab.Sidoarjo</p>
6	Kab. Sidoarjo	<p>Senin, 23 April 2018 Pukul 09.00 WIB</p>	<p>SPKT POLRESTA Sidoarjo</p>	<p>Masyarakat dan Petugas Pelayanan</p>	<p>Giat Sosialisasi Kapokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Sidoarjo tentang “Sidoarjo Bebas Pungli pada Tempat Pelayanan Publik”</p>

7	Kab.Sidoarj o	Rabu, 25 April 2018 Pukul 08.00 WIB	Aula Bharadaksa POLRESTA Sidoarjo	Para Kasium, Kanit Kaurmin dan Operator Pelayanan Bag/Sat/Si dan Polsek Jajaran	Giat Sosialisasi Kapokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Sidoarjo tentang “Sidoarjo Bebas Pungli pada Tempat Pelayanan Publik dan Ciptakan Pelayanan Prima”
---	------------------	--	--	---	---

8	Kab.Sidoarjo	Kamis, 26 April 2018 Pukul 08.00 WIB	Ruang Rapat Sekretariat Kab.Sidoarjo	Para Pejabat Sekretariat Pemda Kab.Sidoarjo dan Staf	Giat Sosialisasi Kapokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Sidoarjo tentang “Sidoarjo Bebas Pungli”
9	Kab.Sidoarjo	Jumat, 27 April 2018 Pukul 08.00 WIB	Ruang Rapat RSUD Sidoarjo	Para Petugas Pelayanan dan Staf	Giat Sosialisasi Kapokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Sidoarjo tentang



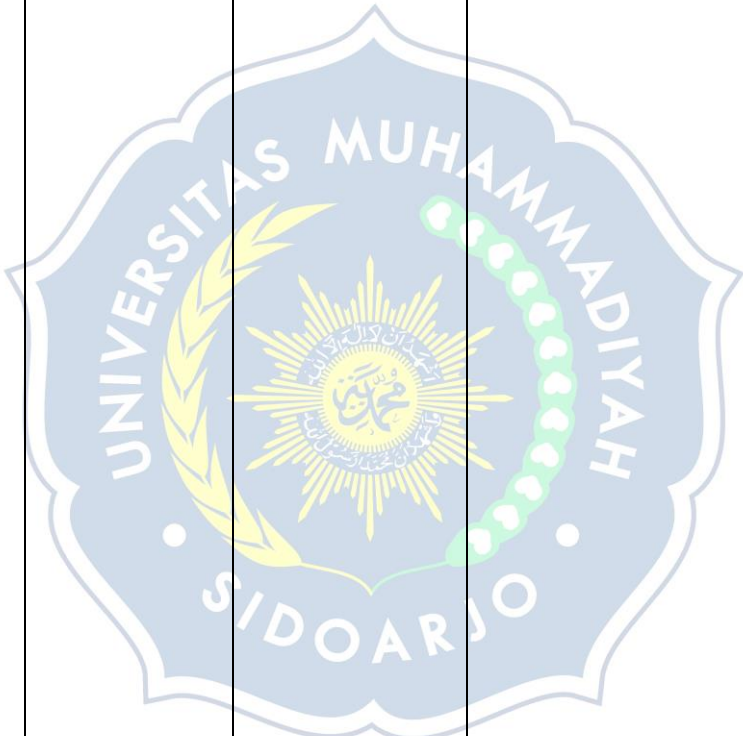
					<p>“Sidoarjo Bebas Pungli pada Tempat Pelayanan Publik Di Lingkungan Rumah Sakit”</p>
10	Kab. Sidoarjo	<p>Sabtu, 28 April 2018 Pukul 08.00 WIB</p>	<p>Aula Bharadaksa POLRESTA Sidoarjo</p>	<p>Parah Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa di Wilayah Kab. Sidoarjo</p>	<p>Giat Silaturahmi dan Sosialisasi Kapolresta Sidoarjo selaku Pengendali Unit Satgas Saber</p>

				Pungli Bersama Kasatbinmas POLRESTA Sidoarjo Selaku Kapokja Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo Tentang Ciptakan Bersama Sidoarjo Bebas Pungli
--	--	--	--	--

11	Kab. Sidoarjo	Selasa, 24 April 2018 Pukul 08.00 WIB s/d Selesai	Ruang Rapat Kantor BPBD Sidoarjo	Para Pejabat dan Staf BPBD Sidoarjo	Giat Sosialisasi Unit Satgas Saber Punglo Sidoarjo Terhadap Para Pejabat dan Staf BPBD Sidoarjo Tentang Satgas Saber Pungli Untuk Ciptakan Sidoarjo Bebas Pungli
12	Kab. Sidoarjo	Selasa, 24 April 2018	Aula Bharadaksa	Para Petugas Pelayanan Pada	Giat Sosialisasi Kapolresta

		Pukul 15.00 WIB	POLRESTA Sidoarjo	Jajaran POLRESTA Sidoarjo (SPKT,SKCK,dan SIM)	Sidoarjo Selaku Pengendali Unit Satgas Saber Pungli Bersama Kasatbinmas POLRESTA Sidoarjo Selaku Kapokja Pencegahan Unit dan Diikuti Para PJU POLRESTA Sidoarjo Beserta
--	--	--------------------	----------------------	--	--

					<p>Anggota Tentang Ciptakan Bersama Sidoarjo Bebas Pungli Di Lingkungan Pelayanan Publik</p>
13	Kab. Sidoarjo	<p>Rabu, 25 April 2018 Pukul 08.00 WIB</p>	<p>Aula Bharadaksa POLRESTA Sidoarjo</p>	<p>Para Personel OPS Lalu Lintas POLRESTA Sidoarjo dan Polsek Jajaran</p>	<p>Giat Sosialisasi dan Arahkan Dari Wakapolresta Sidoarjo Selaku</p>

					Ketua Pelaksana Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo Dalam Lat Pra Ops Patuh Semeru 2018 Agar Selama Menilang/Meni ndak Pelanggar Agar Anggota Lalu Lintas Sebagai <i>Leading</i> Sektor
--	--	--	--	--	--

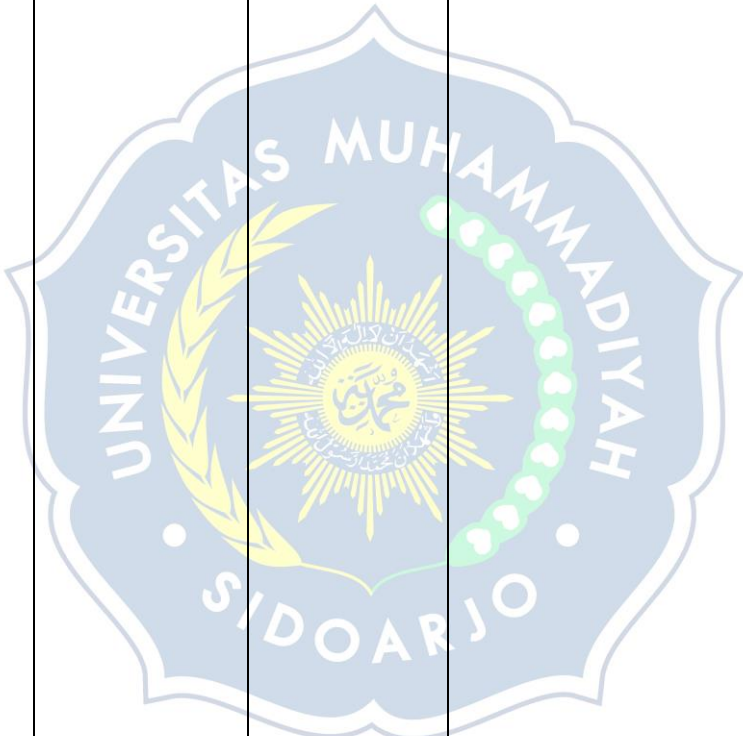


					<p>Tidak Melakukan Pungli Dalam Bentuk Apapun Dan Mari Ciptakan Sidoarjo Bebas Pungli</p>
14	Kab. Sidoarjo	<p>Kamis, 26 April 2018 Pukul 08.00 WIB</p>	<p>Ruang Rapat RSUD Sidoarjo</p>	<p>Para Pejabat RSUD Sidoarjo dan Staf</p>	<p>Giat Sosialisasi Oleh Anggota Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo Pokja Pencegahan Di</p>

					Hadapan Pejabat RSUD Sidoarjo
15	Kab.Sidoarjo	Jumat, 27 April 2018 Pukul 13.00 s/d Selesai	Ruang Rapat Dinas Perikanan	Para Pejabat Dinas Perikanan dan Staf	Sosialisasi Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo Di Hadapan Pejabat Dinas Perikanan
16	Kab. Sidoarjo	Senin, 30 April 2018 Pukul 13.00 s/d Selesai	Ruang Rapat Pemkab Sidoarjo	Sekda, Para Asisten, Para Kabag, dan Kasubbag Pemkab Sidoarjo	Giat Sosialisasi Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo tentang Satgas Saber

					Pungli
<b>MEI 2018</b>					
1	Kab. Sidoarjo	Kamis, 3 Mei 2018 Pukul 08.00 WIB s/d Selesai	Pendopo Kab. Sidoarjo	100 Orang Kepala Sekolah Seluruh Kab.Sidoarjo (SD,SMP,SMA/Sederajat)	Giat Sosialisasi Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo Pokja Pencegahan Kepada 100 Orang Kepala Sekolah Se-Kab Sidoarjo (SD,SMP,SMA/ Sederajat) Mengambil

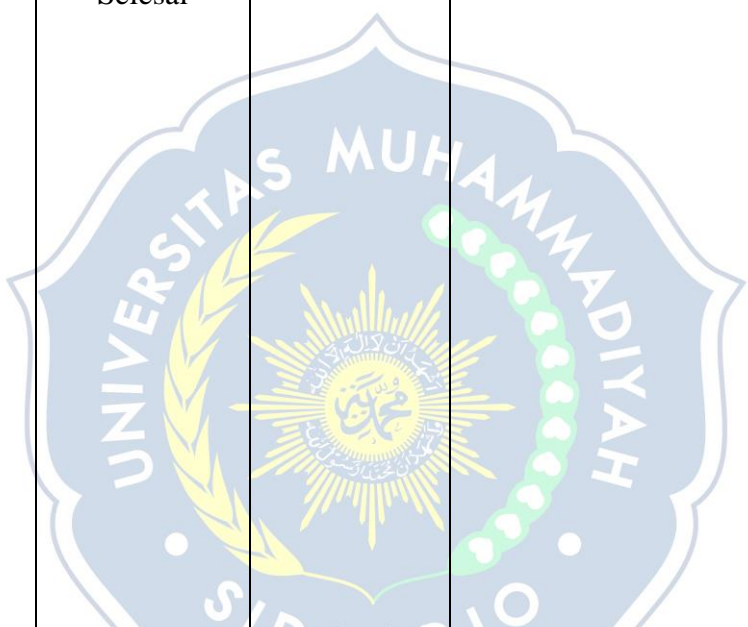
					Tema “Dengan Penyelenggaraa n Pendidikan Yang Baik Ciptakan Sidoarjo Bebas Pungli”
2	Kab. Sidoarjo	Senin. 7 Mei 2018 Pukul 08.00 WIB s/d Selesai	Pendopo Kab. Sidoarjo	Sekretariat Pemkab. Sidoarjo	Giat Sosialisasi Satgas Saber Pungli Sidoarjo Oleh Bapak Komang Ray Wirawan, SH., MH Kasi

				<p>Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Sidoarjo Selaku Anggota Pokja Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo Dihadapan Para Staf Sekretariat Pemkab.Sidoarj o dan Bupati Sidoarjo</p>
--	--	--	--	---

					Dengan Tema “Bersama Kita Ciptakan Sidoarjo Bebas Pungli”
3	Kab. Sidoarjo	Selasa, 8 Mei 2018 Pukul 08.00 s/d Selesai	Ruang Rapat Sekretariat Pemkab Sidoarjo	Para Pejabat dan Staf Pengurus KONI Kab. Sidoarjo	Giat Sosialisasi Satgas Saber Pungli Sidoarjo Oleh Bapak Komang Ray Wirawan, SH., MH Kasi Perdata dan Tata Usaha




					Negara Kejari Sidoarjo Selaku Anggota Pokja Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo Dihadapan Para Staf Pengurus KONI Kab.Sidoarjo
4	Kab.Sidoarjo	Rabu, 9 Mei 2018 Pukul 08.00 s/d	Ruang Rapat Kemenag Kab.Sidoarjo	Pejabat dan Staf Kemenag Kab. Sidoarjo	Giat Sosialisasi Unit Satgas Saber Pungli

		Selesai			Sidoarjo Oleh Anggota Pokja Pencegahan Tentang UU No.11 Tahun 1980 Tindak Pidana Suap dan Perpres No 87 Tahun 2016 di Lingkungan Kemenag Kab.Sidoarjo
5	Kab. Sidoarjo	Kamis, 10 Mei 2018	Ruang Rapat Dinas	Pejabat dan Staf Perpustakaan Dan	Giati Sosialisasi Oleh Sekretaris

		Pukul 08.00 WIB s/d Selesai	Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Sidoarjo	Kearsipan Kab. Sidoarjo	Inspektorat Kab. Sidoarjo Andjar Surjadianto, S.Sos Selaku Sekretaris Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo Terhadap Para Pejabat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sidoarjo
6	Kab. Sidoarjo	Sabtu, 12 Mei	Tempat	Masyarakat	Giat Sosialisasi

		2018 Pukul 08.00 WIB s/d Selesai	Pelayanan Publik (SATPAS SIM)		Dilanjutkan Pembagian Brosur Dan Pemasangan Pamflet Pada Tempat Pelayanan Publik Di POLRESTA Sidoarjo Oleh Kasatbinmas Polresta Sidoarjo Kompol Agus
--	--	--	--	--	---

					Suwandi, SH Selaku Kapokja Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo
7	Kab. Sidoarjo	Senin, 14 Mei 2018 Pukul 08.00 s/d Selesai	Tempat Pelayanan Publik (SKCK)	Masyarakat	Giat Sosialisasi Dilanjutkan Pembagian Brosur Dan Pemasangan Pamflet Pada Tempat Pelayanan

					Publik Di POLRESTA Sidoarjo Oleh Kasatbinmas Polresta Sidoarjo Kompol Agus Suwandi, SH Selaku Kapokja Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo
8	Kab. Sidoarjo	Rabu, 16 Mei	Tempat	Masyarakat	Giat Sosialisasi

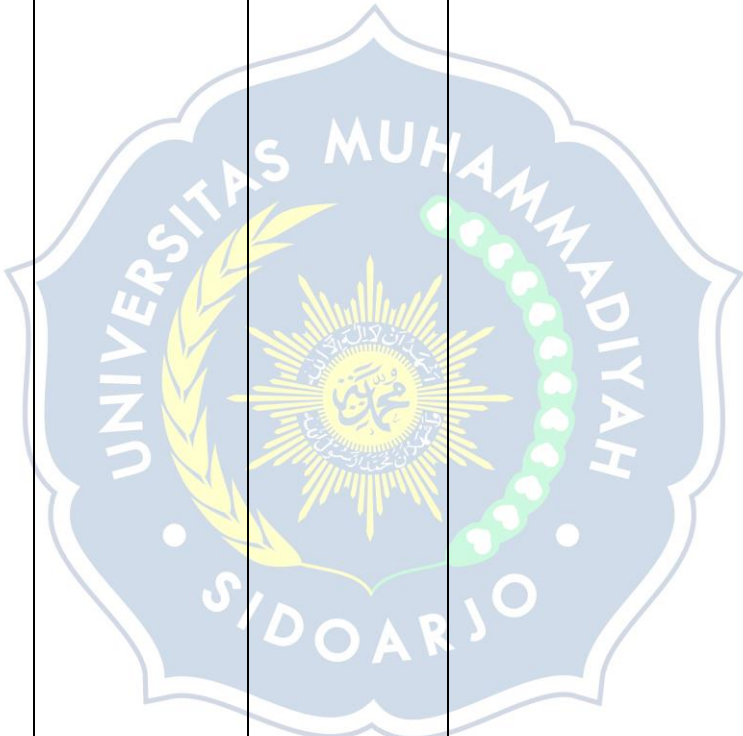


		2018 Pukul 08.00 WIB s/d Selesai	Pelayanan Publik (SPKT)		Dilanjutkan Pembagian Brosur Dan Pemasangan Pamflet Pada Tempat Pelayanan Publik Di POLRESTA Sidoarjo Oleh Kasatbinmas Polresta Sidoarjo Kompol Agus
--	--	--	-------------------------------	--	---

					Suwandi, SH Selaku Kapokja Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo
9	Kab. Sidoarjo	Kamis, 17 Mei 2018 Pukul 08.00 WIB s/d Selesai	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo	Pejabat dan Staf Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo	Giat Sosialisasi Oleh Sekretaris Inspektorat Kab. Sidoarjo Andjar Surjadio, S.Sos Selaku Sekretaris Unit

					Satgas Saber Pungli Sidoarjo Terhadap Para Pejabat Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo
1 0	Kab. Sidoarjo	Jumat, 18 Mei 2018 Pukul 08.00 s/d Selesai	Kantor Dinas Sosial Kab. Sidoarjo	Pejabat dan Staf Dinsos Kab. Sidoarjo	Giat Sosialisasi Oleh Sekretaris Inspektorat Kab. Sidoarjo Andjar Surjadio, S.Sos Selaku Sekretaris Unit

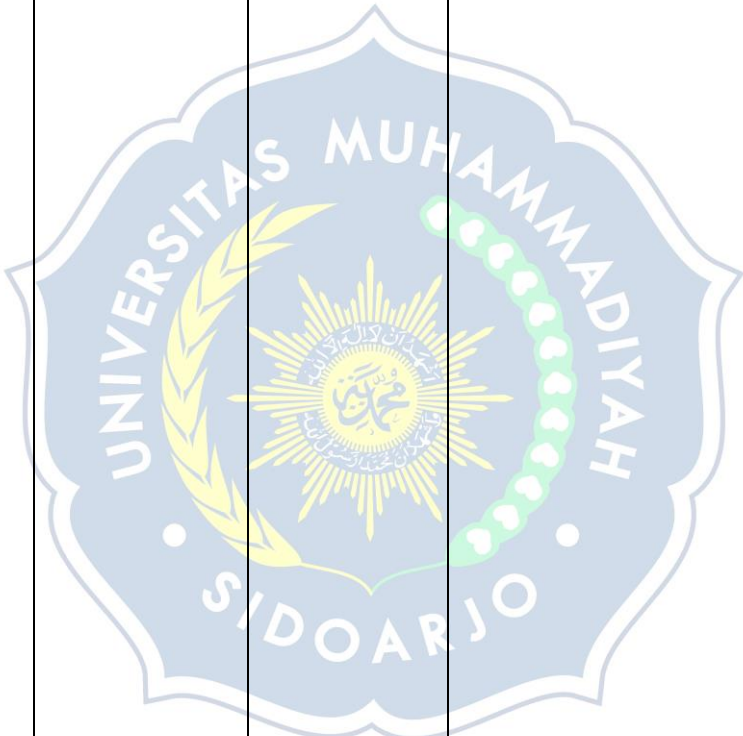
					Satgas Saber Pungli Sidoarjo Terhadap Para Pejabat Dinas Sosial Kab. Sidoarjo
1 1	Kab. Sidoarjo	Sabtu, 19 Mei 2018 Pukul 08.00 WIB s/d Selesai	Aula Bharadaksa POLRESTA Sidoarjo	Para Kanit Intel, Kanit Reskrim, Kanit Binmas dan Kasi Humas Polsek Jajaran	Giat Pokja Pencegahan Kompol Agus Suwandi, SH Memberikan Edukasi Kepada Para Kanit Intel, Kanit Reskrim,

				<p>           Kanit Binmas,            dan Kasi Humas            Polsek Jajaran            Yang Dihadiri            Ketua Pelaksana            Satgas Saber            Pungli Sidoarjo,            Kapokja            Gakkum, dan            Anggota Pokja            Inteligen            Tentang Unit            Saber Pungli            Sidoarjo         </p>
--	--	--	--	--


1	Kab. Sidoarjo	Senin, 21 Mei	Kantor	Para Pejabat Dinas	Giat Sosialisasi
2		2018 Pukul	Dinas	Penanaman Modal	Saber Pungli
		08.00 WIB	Penanaman	Dan Pelayanan	Oleh Bapak
		s/d Selesai	Modal Dan	Terpadu Satu Pintu	Solikin
			Pelayanan	Sidoarjo	Inspektorat
			Terpadu		Kab.Sidoarjo
			Satu Pintu		Selaku Anggota
			Sidoarjo		Pokja Intelijen
					Terhadap Para
					Pejabat Dinas
					Penanaman
					Modal Dan
					Pelayanan
					Terpadu Satu




					Pintu Sidoarjo
1 3	Kab. Sidoarjo	Selasa, 22 Mei 2018 Pukul 20.00 WIB s/d 23.30 WIB	Di Balai RT/RW 04/04 Perumahan Alam Mutiar Kendal Pecabean Candi Sidoarjo	Kades Kendal Pecabean Kec. Candi Beserta Stafnya, Ketua RT, Ketua RW, Tomas, Toga, Toda, Babinsa dan Bhabinkantibmas	Cangkrukan Kamtibmas Oleh Kasatbinmas POLRESTA Sidoarjo Selaku Kapokja Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo di Balai RT/RW 04/04

				<p>Perumahan          Alam Mutiara          Kendal          Pecabean Candi          Sidoarjo          Dengan Sasaran          Kades Kendal          Pecabean          Kec.Candi          Beserta Stafnya,          Ketua RW,          Ketua RT,          Tomas, Toga,          Toda, Babinsa</p>
--	--	--	--	--

					dan Bhabinkantibmas
1 4	Kab. Sidoarjo	Rabu, 23 Mei 2018 Pukul 20.00 WIB s/d 23.30 WIB	Balai Desa Jemirahan Kec. Jabon Kab. Sidoarjo	Kades Beserta Staf, Ketua RT, Ketua RW, Tomas, Toga, Toda, Babinsa dan Bhabinkantibmas	Cangkrukan Kamtibmas Oleh Kasatbinmas POLRESTA Sidoarjo Selaku Kapokja Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo di

				<p>Balai Desa Jemirahan, Jabon Sidoarjo Dengan Sasaran Kades Jemirahan Kec. Jabon Beserta Stafnya, Ketua RW, Ketua RT, Tomas, Toga, Toda, Babinsa dan Bhabinkantibma s</p>
--	--	--	--	--

1 5	Kec. Sidoarjo	Kamis, 24 Mei 2018 Pukul 20.00 WIB s/d 23.30 WIB	Balai Desa Sumber Rejo Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo	Kades Beserta Staf, Ketua RT, Ketua RW, Tomas, Toga, Toda, Babinsa dan Bhabinkantibmas	Cangkrukan Kamtibmas Oleh Kasatbinmas POLRESTA Sidoarjo Selaku Kapokja Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo di Balai Desa Sumber Rejo, Wonoayu
--------	---------------	--	---	--	---

					<p>Sidoarjo</p> <p>Dengan Sasaran</p> <p>Kades Sumber</p> <p>Rejo Kec.</p> <p>Wonoayu</p> <p>Beserta Stafnya,</p> <p>Ketua RW,</p> <p>Ketua RT,</p> <p>Tomas, Toga,</p> <p>Toda, Babinsa</p> <p>dan</p> <p>Bhabinkantibma</p> <p>s</p>
1	Kab. Sidoarjo	Jumat, 25 Mei	Balai Desa	Kades Beserta Staf,	Cangkrukan

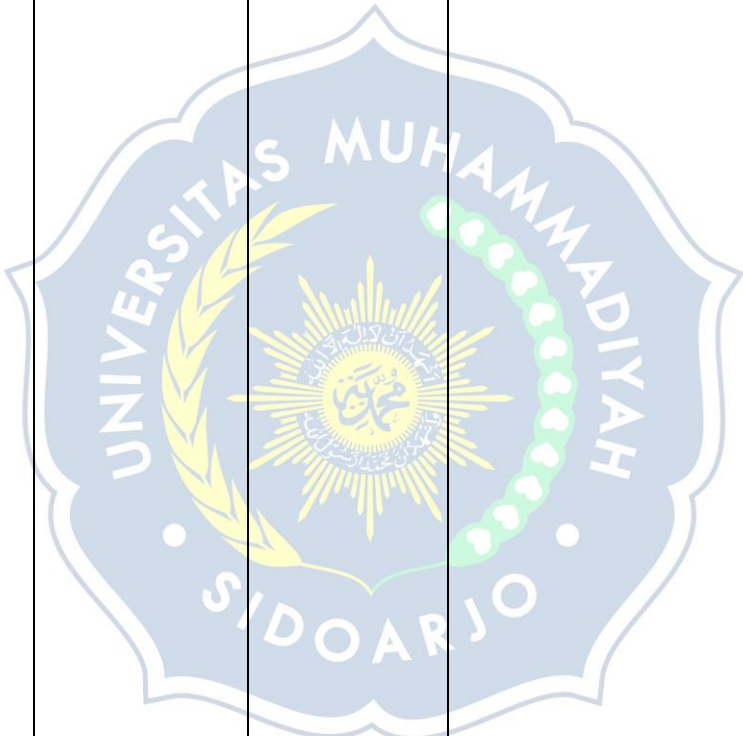


6		2018 Pukul 16.00 WIB s/d 17.30 wib	Simogirang Kec. Prambon	Ketua RT, Ketua RW, Tomas, Toga, Toda, Babinsa dan Bhabinkantibmas	Kamtibmas Oleh Kasatbinmas POLRESTA Sidoarjo Selaku Kapokja Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo di Balai Desa Simogirang, Prambon Sidoarjo
---	--	--	-------------------------------	---	--

					<p>Dengan Sasaran</p> <p>Kades</p> <p>Simogirang</p> <p>Kec. Prambon</p> <p>Beserta Stafnya,</p> <p>Ketua RW,</p> <p>Ketua RT,</p> <p>Tomas, Toga,</p> <p>Toda, Babinsa</p> <p>dan</p> <p>Bhabinkantibmas</p>
1 7	Kab. Sidoarjo	Sabtu, 26 Mei 2018 Pukul	Di Aula Polsek	Kades Beserta Staf, Ketua RT, Ketua	Cangkrukan Kamtibmas


		20.00 WIB s/d 23.30 WIB	Taman Sidoarjo	RW, Tomas, Toga, Toda, Babinsa dan Bhabinkantibmas	Oleh Kasatbinmas POLRESTA Sidoarjo Selaku Kapokja Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo Aula Polsek Taman Sidoarjo Dengan Sasaran Kades Taman Beserta Stafnya,
--	--	-------------------------------	-------------------	--	--

					Ketua RW, Ketua RT, Tomas, Toga, Toda, Babinsa dan Bhabinkantibmas
1 8	Kab. Sidoarjo	Senin, 28 Mei 2018 Pukul 16.00 WIB s/d 17.15 WIB	Balai Desa Krembung	Kades Beserta Staf, Ketua RT, Ketua RW, Tomas, Toga, Toda, Babinsa dan Bhabinkantibmas	Cangkrukan Kamtibmas Oleh Kasatbinmas POLRESTA Sidoarjo Selaku Kapokja

				<p>Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo Yang Dihadiri Tiga Pilar Kecamatan Dan Desa Krembung Serta Toga, Dan Tomas Dengan Materi Harkamtibmas, Serta Pencegahan</p>
--	--	--	--	---

					Terorisme Yaitu Deradikalisasi Serta Sosialisasi Saber Pungli
1 9	Kab. Sidoarjo	Selasa, 29 Mei 2018 Pukul 20.00 WIB s/d Selesai	Balai Kecamatan Tulangan	Kades Beserta Staf, Ketua RT, Ketua RW, Tomas, Toga, Toda, Babinsa dan Bhabinkantibmas	Cangkrukan Kamtibmas Oleh Kasatbinmas POLRESTA Sidoarjo Selaku Kapokja Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli



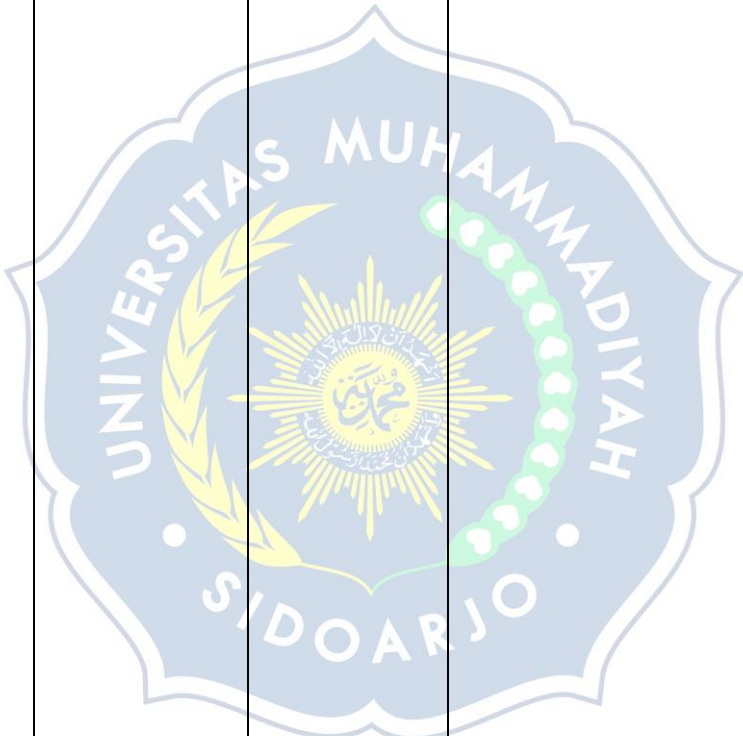
					<p>Sidoarjo Yang Dihadiri Forkopimka Dan Toga, Tomas Serta Toda, Dengan Materi Pemeliharaan Kamtibmas, Penjagaan Situasi Dan Sosialisasi Saber Pungli</p>
2	Kab. Sidoarjo	Rabu, 30 Mei	Balai Desa	Kades Beserta Staf,	Cangkrukan

0		2018 Pukul 20.00 WIB s/d Selesai	Sarirogo Kec.Sidoarjo	Ketua RT, Ketua RW, Tomas, Toga, Toda, Babinsa dan Bhabinkantibmas	Kamtibmas Oleh Kasatbinmas POLRESTA Sidoarjo Selaku Kapokja Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo, Dengan Materi Pemeliharaan Kamtibmas Pasca Teror
---	--	--	--------------------------	---	---

					<p>Dan Pemulihan Kondisi, Serta Sosialisasi Saber Pungli Dengan Harapan Sidoarjo Bebas Pungli</p>
2 1	Kab. Sidoarjo	<p>Kamis, 31 Mei 2018 Pukul 20.00 WIB s/d Selesai</p>	<p>Kantor Kec. Porong</p>	<p>Kades Beserta Staf, Ketua RT, Ketua RW, Tomas, Toga, Toda, Babinsa dan Bhabinkantibmas</p>	<p>Di Kantor Kec. Porong Telah Dilaksanakan Cangkrukan Anggota Binmas</p>

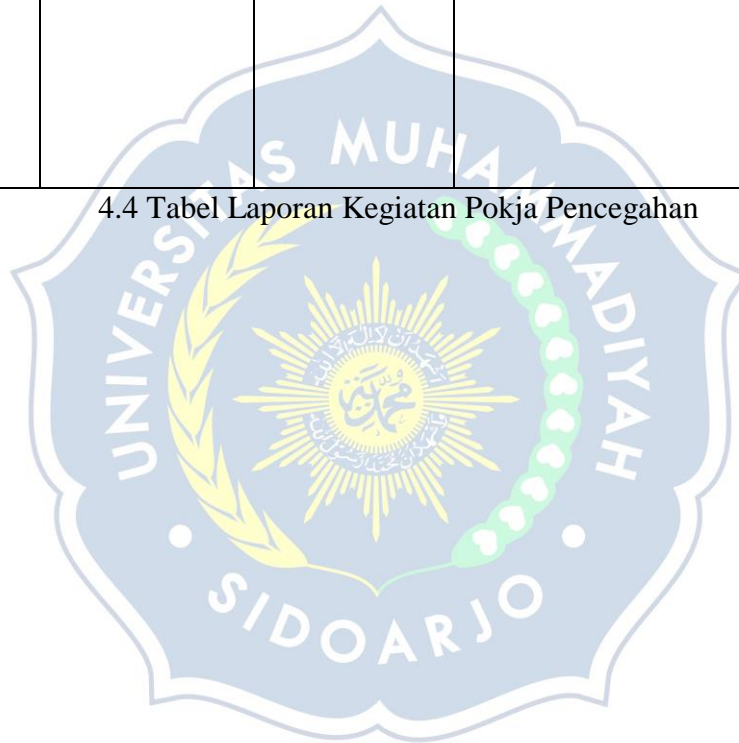
					<p>POLRESTA Sidoarjo Selaku Anggota Pokja Pencegahan Unit Satgas Saber Pungli Sidoarjo Dengan Materi Pemeliharaan Kamtibmas Pasca Teror Dan Pemulihan Kondisi, Serta Sosialisasi</p>
--	--	--	--	--	--

					Saber Pungli Dengan Harapan Sidoarjo Bebas Pungli
2 2	Kab. Sidoarjo	Kamis, 31 Mei 2018 Pukul 16.00 WIB s/d 17.30 WIB	Balai Desa Simogirang Kec. Prambon	Kades Beserta Staf, Ketua RT, Ketua RW, Tomas, Toga, Toda, Babinsa dan Bhabinkantibmas	Di Balai Desa Simogirang Kec. Prambon Telah Dilaksanakan Cangkrukan Anggota Binmas POLRESTA

				<p>Sidoarjo Selaku          Anggota Pokja          Pencegahan          Unit Satgas          Saber Pungli          Sidoarjo          Dengan Materi          Pemeliharaan          Kamtibmas          Pasca Teror          Dan Pemulihan          Kondisi, Serta          Sosialisasi          Saber Pungli</p>
--	--	--	--	---

					<p>Dengan Harapan Sidoarjo Bebas Pungli</p>
--	--	--	--	--	---

4.4 Tabel Laporan Kegiatan Pokja Pencegahan





Tabel kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk laporan pokja yang diselesaikan pada setiap bulan. Bentuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan merupakan langkah preventif yang diambil oleh pokja pencegahan sebagai upaya meminimalkan jumlah pungli di Kabupaten Sidoarjo. Tim yang *solid* memudahkan koordinasi antara satu dan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Hal merupakan poin penting dalam keberhasilan dan kelancaran program pokja pencegahan. Kegiatan-kegiatan sosialisasi tersebut sesuai dengan kewenangannya.<sup>62</sup>

#### **4.3.2 Kelompok Kerja Penindakan**

Kelompok Kerja Penindakan, yang beranggotakan Komandan Sub Denpom V/4-1 Sidoarjo, Kepala Seksi Profesi Pengamanan Polresta Sidoarjo, seorang Jaksa Fungsional Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Pembantu I, dan Kepala Unit Tipikor Polresta Sidoarjo dengan ketua pokja Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sidoarjo, memiliki tugas melakukan upaya-upaya represif dengan bentuk OTT sesuai dengan kewenangannya terhadap para pelaku pungli di Kabupaten Sidoarjo. Harapan dari upaya represif tersebut adalah memberi

---

<sup>62</sup>“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,” 2016, 2–6. Pasal 4

efek jerah kepada pelaku sekaligus menjadi pembelajaran bagi tiap individu agar tidak melakukan pungli. Menurut hasil penelitian, pokja penindakan telah melakukan beberapa kali OTT. Pada rentang April s/d Mei 2018 terdapat 1 (satu) pengaduan, seperti table dibawah ini:<sup>63</sup>

<b>April</b>	<b>Mei</b>
<b>Nihil</b>	<b>1</b>

Tabel 4.5 Laporan Hasil Kegiatan Pokja Penindakan

Kejadian pelaporan yang terjadi pada bulan Mei 2018 adalah pegawai Dinas Perhubungan yang melakukan pungutan liar pada parkir berlangganan. Pegawai Dishub tersebut berstatus sebagai pegawai honorer, sedang pegawai satunya merupakan jukir. Kedua pegawai tersebut mendapatkan honor yang dibayarkan Dishub pada setiap bulan. Pengakuan dari kedua pelaku, bahwa mereka melakukan penarikan sebesar Rp 2.000,- pada setiap pengunjung, berdasar pengakuan tersebut penarikan tidak dilakukan secara paksa namun pengunjung memberikan uang tersebut secara sukarela. Pegawai honorer tersebut dapat dijerat Pasal 11 juncto Pasal 12 huruf A dan huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia

---

<sup>63</sup> Laporan Hasil Kegiatan Pokja Penindakan April s/d Mei 2018, diperoleh dari Pokja Penindakan Pada Tanggal 3 Juni 2018 Pukul 15.45 WIB

Tentang Tindak Pidana Korupsi serta juncto Pasal 55 KUHP. Sedangkan pada Jukir tersebut dapat dikenakan Pasal 368 Ayat 1 KUHP.

Terkait kasus pada kedua pegawai tersebut, sanksi yang diberikan berbentuk pembinaan. Pembinaan dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk membina. Meningat pada kasus ini digolongkan sebagai pungli dalam kategori kecil.<sup>64</sup> Berdasarkan hasil wawancara pada tim satgas pokja penindakan pungli yang tergolong kecil akan dilimpahkan pada pokja Yustisi dan dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan untuk pelaku pungli yang berstatus sebagai PNS akan dilakukan oleh penanggungjawab sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 16 dijabarkan pejabat-pejabat yang memiliki hak melakukan penghukuman, dan proses penghukuman tersebut sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1.<sup>65</sup> Untuk pegawai yang berstatus *outsourcing* dilakukan pembinaan oleh perusahaan atau instansi yang bertanggungjawab, akibat perjanjian kontrak kerjanya.<sup>66</sup> Pungli yang termasuk dalam katagori besar akan dilimpahkan pada

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Pokja Penindakan Saber Pungli Sidoarjo, Pada Unit Tipikor POLRESTA Sidoarjo, pada tanggal 18 Juni 2018 Pukul 11.00 WIB

<sup>65</sup> “Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; c. hukuman disiplin berat”

<sup>66</sup> Wawancara dengan salah satu anggota Saber Pungli Sidoarjo, pada tanggal 8 Agustus 2018

Pengadilan Tipikor. Kenyataan tersebut dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa pungli di Kabupaten Sidoarjo tidak serta merta menjadi tindak pidana.<sup>67</sup> Fakta yang berjalan selama ini, dalam penggolongan tersebut belum terdapat aturan ataupun standar yang baku. Sehingga dapat dimungkinkan terjadi ketidakpastian hukum. Selain itu, Kepolisian yang lebih dahulu memiliki aturan/SOP terlihat memiliki kerja yang lebih ekstra dibandingkan dengan anggota-anggota yang lain. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidak rataan beban kerja pada keanggotaan satgas. SOP terkait pelimpahan dari proses penindakan oleh pokja penindakan kepada pokja yustisi juga masih belum memiliki SOP yang khusus. Selama ini proses pelimpahan dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi.

Pokja yang akan menentukan kasus akan diselesaikan secara etik kepegawaian atau secara pidana adalah pokja Yustisi. Kegiatan OTT tersebut sesuai dengan Pasal 4 huruf D.<sup>68</sup> Secara global kegiatan-kegiatan Satgas Saber Pungli tersebut diatas selaras dengan fungsi satgas sebagaimana tercantum pada diktum ketiga Keputusan Bupati Nomor 188/235/404.1.1.3/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/678/404.1.1.3/2017

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Pokja Penindakan Saber Pungli Sidoarjo, Pada Unit Tipikor POLRESTA Sidoarjo, pada tanggal 18 Juni 2018 Pukul 11.00 WIB

<sup>68</sup>“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.”

Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo, dan memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari perangkat daerah dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Mengkoordinasi, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. Melakukan operasi tangkap tangan;
- e. Memberi rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melakukan evaluasi kegiatan pemberantasan pengutan liar; dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo, memiliki leaflet sebagai bahan promosi atau sosialisasi. Leaflet tersebut disebarakan pada Instansi-instansi pemerintahan ataupun pada masyarakat. Informasi yang diberikan pada leaflet tersebut

mencakup struktur organisasi satgas, visi dan misi satgas, pengertian pungli dan tata cara pelaporan pungli. Hasil yang didapat dari penelitian, bahwa selama ini satgas menerima laporan melalui telepon dan juga e-mail. Pada via telepon, pelapor dapat melakukan SMS maupun telepon yang akan terhubung secara langsung kepada tim satgas. Pelapor juga dapat melakukan pelaporan secara langsung dengan mendatangi kantor Satgas Saber Pungli di Polres Sidoarjo. Letak kantor berdekatan dengan kantor Tipikor. Untuk sementara ini, Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo belum memiliki laman ataupun media sosial, sebagai sarana pelaporan ataupun sosialisasi. Masyarakat yang melakukan pelaporan akan dirahasiakan identitasnya. secara umum, wadah pelaporan yang disediakan satgas telah memenuhi Pasal 4 huruf B.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.”



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

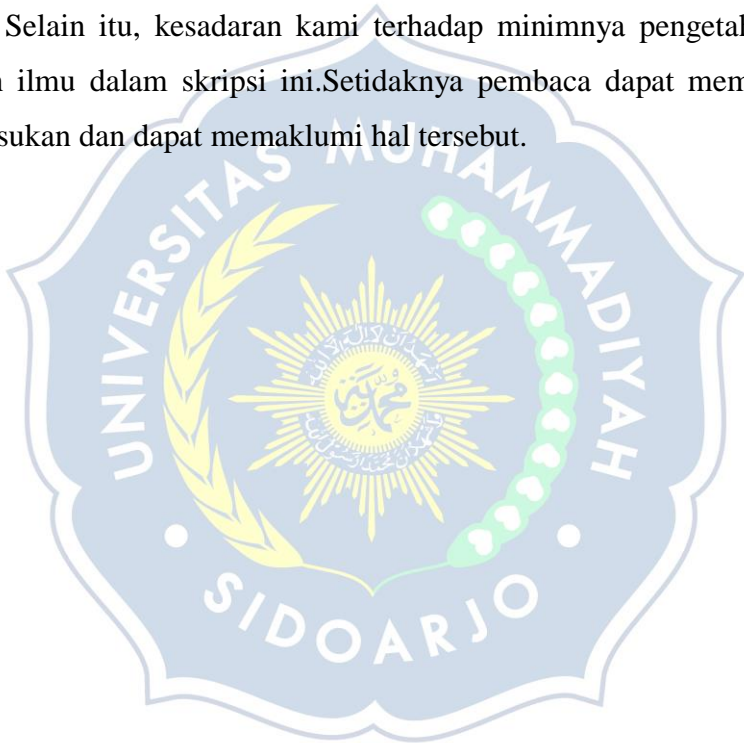
Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang impementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Saber Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pembentukan Satgas Saber Pungli adalah Keputusan Bupati Nomor 188/235/438.1.1.3/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Dari Hasil Penelitian, bahwa kasus pungli di Sidoarjo tidak serta merta menjadi kasus pidana, tetapi sebagai kasus yang dapat diselesaikan secara pembinaan etik oleh instansi yang berwenang. Selain itu dalam pelaksanaannya, tidak ditemui kesulitan yang berarti. Namun masih minimnya aturan/SOP membuat pembagian kerja satgas tidak merata, dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.



## 5.2 Saran

Dari penelitian yang kami lakukan selama 1 (satu) bulan pada Satgas Saber Pungli. Masukan yang dapat kami sampaikan, alangkah baiknya bahwa segera disusun SOP khusus terkait kegiatan-kegiatan satgas.

Selain itu, kesadaran kami terhadap minimnya pengetahuan dan ilmu dalam skripsi ini. Setidaknya pembaca dapat memberi masukan dan dapat memaklumi hal tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Kemendikbud.2011.*Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi*.Jakarta:Kemendikbud

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*. CV Alfabeta.2017. Hlm.71

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar 1945” 4, no. 1 (2002): 10.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Presiden Republik Indonesia. “Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Tidana Korupsi,” no. 1 (2001): 1–19.

“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,” 2016, 2–6.

Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/235/438.1.1.3/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo.

### C. Jurnal

- Achnes, Sofia. “Pelayanan Prima Sebagai Upaya Pelaksanaan Good Government.” *Pelayanan Prima Sebagai Upaya Pelaksanaan Good Government* 3 (2012): 27–37.
- Amiruddin. “ANALISIS POLA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH” 8, no. 1 (2012): 26–37.
- Ariesta Pratama dan Supriyadi. “KEPRIBADIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERINTEGRITAS BERDASARKAN TEORI EYSENCK Ariesta Handoko Pratama Dan Supriyadi” 1, no. 3 (2014): 74–87.
- David Daniel Paruntu. “Tolok Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi.” *Tolok Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi* III, no. 2 (2014).
- DR. Emrus. “Strategi Pelayanan Publik Yang Prima Oleh Aparat Pemda Banten.” *Strategi Pelayanan Publik Yang Prima Oleh Aparat Pemda Banten*, 2011, 145.
- Erick Betra Spetiadi. “Upaya Penanggulangan Oleh Sat Reskrim Polres Lampung Terhadap Kejahatan Pemerasan Yang Dilakukan Kelompok Preman Di Jalan Lintas Timur,” n.d.
- Hidayanto, M Fajar. “KEPEMIMPINAN DAN KORUPSI ( SIMBIOSIS MUTUALISME ).” *KEPEMIMPINAN DAN KORUPSI ( SIMBIOSIS MUTUALISME )* XIII (2005): 34–43.

Hutapea, Juli Antoro. "PERBUATAN PUNGUTAN LIAR ( PUNGLI )," no. 1 (2001): 1–39.

———. "Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU.RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi J.o UU RI Nomor 20 Tahun 2001)," n.d.

I Gede Sadia Dwi Ratmaja; I Ketut Keneng; I Ketut Sadjana. "HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT ( UNDANG-UNDANG NOMOR." *Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)*, no. 3 (2000): 1–10.

Intan Yunasri Purwita. "UNSUR KERUGIAN NEGARA AKIBAT PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI," 2014, KeruGian, keuanGan NeGara, Korupsi.

Mustofa, Muhammad, and Kata Kunci. "SUAP MENYUAP DAN MAFIA PERADILAN DI INDONESIA : TELAAH KRIMINOLOGIS," 2000, 1–5.

Nodi, Hamzar. "Pertanggungjawaban Pejabat Administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Pada Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi."

*Pertanggungjawaban Pejabat Administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Pada Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi* 3, no. 1 (n.d.).

Retno Andreas. “Peranan Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Pekanbaru Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbuatan Curang Yang Dilakukan Ole Calo Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kota Pekanbaru” II (2015): 1–15.

Setaya, I Made Adi. “Oleh : I MADE ADI SERAYA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA ABSTRACT.” *Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Udayana, 2012.

Tin Hulukati. “Pungutan Liar (Pungli), Jenis Tindak Pidana Kriminalitas Tergolong Berat,” n.d.

Upaya, Dalam, Pencegahan Praktik, Pungutan Liar, Bidang Pendidikan, D I Kabupaten, Muhammad Askar, Fakultas Syariah, and D A N Hukum. “Uin Alauddin Makassar 2017,” 2017.

Wahyu Ramadhani. “PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR TERHADAP PELAYANAN PUBLIK.” *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik* 12 (2017): 263–76.

Zulkarnain Umar. “Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik” I (2017): 1–13.

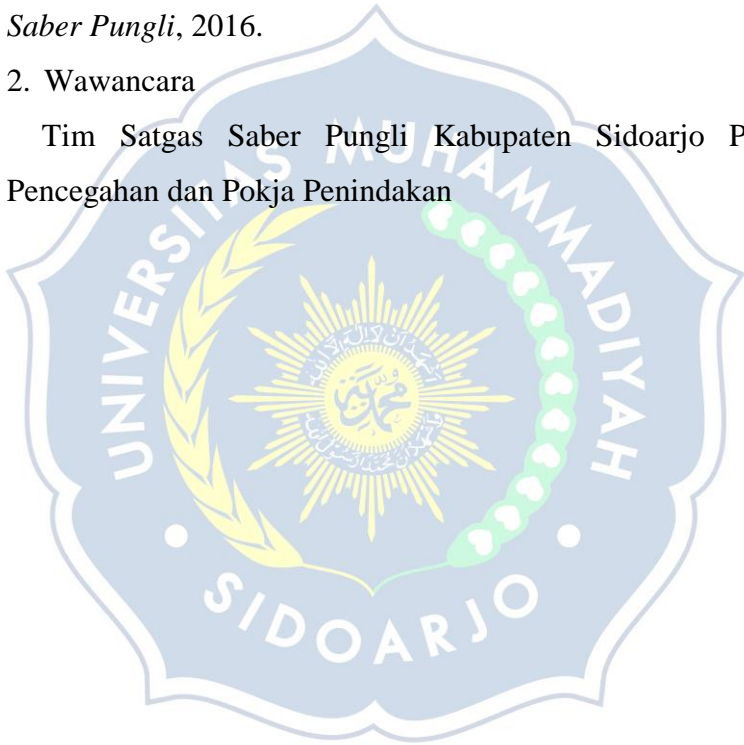
#### **D. Lain-Lain**

##### **1. Materi Rapat**

Polhukam, Kemenko. “Satgas ‘saber Pungli.’” In *Satgas Saber Pungli*, 2016.

##### **2. Wawancara**

Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Sidoarjo Pokja Pencegahan dan Pokja Penindakan





# REKAPITULASI BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM UMSIDA

Nama Mahasiswa

Mydrilla Putri Chindrawan.

Judul Skripsi

Implementasi Perpres 87/2016  
Tentang Satgas Saber Pungut dan upaya penanggulangan Pungut - St. Lab S2  
Dosen Pembimbing Rifaat Rido Pantaulay, S.H., M.H.

No	Tgl/Tanggal	Urutan Bimbingan/ Perihal	ITD Dosen Pembimbing	ITD Mahasiswa
	Selasa 9/4	aurt.		
	Kamis 23/4	Revisi Proposal		
	Selasa 27/4	Revisi proposal		
	Selasa 24/4	Revisi proposal		
	Sabtu 28/4	Revisi bab 4		
	Senin 2/5	Revisi bab 4		
	Kamis 6/5	Koreksi Bab 4-5		
	Selasa 24/4	Revisi bab 4-5		
	Paku 25/4	Revisi Bab 4-5		
	Jumat 27/4	Revisi Bab 4-5		
	Senin 30/4	Revisi Bab 4-5		
	Sabtu 7/5	Revisi Bab 4-5		
	Sabtu 8/5	Acc Skripsi		